

V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

A. PENJELASAN UMUM

A.1. Profil dan Kebijakan Teknis Stasiun Pengawasan SDKP Biak

*Dasar Hukum
Entitas dan
Rencana
Strategis*

Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Biak merupakan bagian dari Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) yang dibentuk berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor : 33/PERMEN-KP/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan. **Visi dan Misi Direktorat Jenderal PSDKP** memiliki Visi Penanggulangan dan penyelesaian IUU Fishing dan Keamanan Laut. Dan Misi Pengawasan Kelautan dan Perikanan serta Keamanan Laut; Penguatan Lembaga, aparatur pengawasn dan penegakan hukum, serta masyarakat; dan Penataan Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP), Perijinan Kapal Perikanan, Peningkatan Ketaatan serta Penanganan Pelanggaran. Yang sesuai dengan **Visi Misi Kementerian Kelautan dan Perikanan** yakni Mewujudkan sektor Kelautan dan Perikanan Indonesia yang mandiri, maju, kuat dan berbasis kepentingan nasional. Stasiun PSDKP memiliki misi yaitu meningkatkan kapasitas dan

kapabilitas pengawasan dalam pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan, meningkatkan efektifitas penanganan pelanggaran terhadap pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan, serta terwujudnya reformasi birokrasi di lingkungan Direktorat Jenderal PSDKP.

Wilayah kerja Stasiun PSDKP Biak merupakan Wilayah Pengelolaan Perairan Republik Indonesia (WPP-RI) 717. WPP-RI merupakan wilayah pengelolaan perikanan untuk penangkapan ikan, konservasi, penelitian, dan pengembangan perikanan meliputi perairan pedalaman, perairan kepulauan, laut territorial, zona tambahan, dan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI). Wilayah kerja Stasiun PSDKP Biak meliputi Perairan di sekitaran Samudra Pasifik.

Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Biak mempunyai tugas untuk melaksanakan pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan berdasarkan peraturan perundang – undangan yang berlaku. Sedangkan fungsi yang di emban adalah melakukan penyusunan rencana, program dan evaluasi di bidang pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan, melaksanakan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan, melaksanakan penanganan pelanggaran evaluasi penanganan pelanggaran sumber daya kelautan dan perikanan, melaksanakan operasional dan persiapan logistik kegiatan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan, melaksanakan pemeliharaan sarana dan prasarana pengawasan, melaksanakan perencanaan dan pengembangan sarana dan prasarana pengawasan, serta

melaksanakan urusan tata usaha dan rumah tangga.

Untuk mewujudkan tujuan di atas Stasiun PSDKP Biak berkomitmen dengan visi yang mengacu kepada visi Kementerian Kelautan dan Perikanan yaitu **“Perairan Indonesia bebas Illegal, Unreported, and Unregulated (IUU) Fishing, dan kegiatan yang merusak Sumber Daya Kelautan dan Perikanan untuk mewujudkan Kedaulatan dalam mengelola Sumber Daya Kelautan dan Perikanan secara Berkelanjutan untuk Kesejahteraan Masyarakat.”** Untuk mewujudkannya akan dilakukan beberapa langkah-langkah strategis sebagai berikut:

- Meningkatnya pengelolaan sumber daya pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan yang berkelanjutan
- Tersedianya infrastruktur Pengawasan SDKP, sistem informasi, dan komunikasi pengawasan SKDP
- Terselenggaranya pengawasan SDKP secara efektif
- Terwujudnya ASN UPT PSDKP yang kompeten
- Informasi pengawasan SDKP yang valid, handal, dan mudah diakses
- Terwujudnya pranata dan kelembagaan birokrasi UPT PSDKP yang berkepribadian
- Terkelolanya anggaran UPT PSDKP secara efisien.
- Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya di Stasiun PSDKP Biak didukung oleh ketersediaan SDM yang berkompeten diantaranya sebagai berikut :
 1. PNS 27 pegawai (Struktural 2 orang, Fungsional Pengawas Perikanan 8 orang, Fungsional Kelautan 3

orangm Fungsional Penata Perzinan 3 orang dan Fungsional Umum 3 orang) , PPPK 13 orang;

2. Awak KP Hiu Macan 04 sebanyak 17 orang (PNS 16 orang , dan PPPN 1 orang);
3. PPNPN 6 orang.
4. PJLP 11 Orang.

*Pendekatan
Penyusunan
Laporan
Keuangan*

A.2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Tahun 2024 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Stasiun Pengawasan SDKP Biak. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Laporan Keuangan Tahun 2024 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Stasiun Pengawasan SDKP Biak. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem SAI terdiri dari Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrua (SAIBA) dan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN). SAI dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Sedangkan SIMAK-BMN adalah sistem yang menghasilkan informasi aset tetap, persediaan, dan aset lainnya untuk penyusunan neraca dan laporan barang milik negara serta laporan manajerial lainnya.

*Basis
Akuntansi*

A.3. Basis Akuntansi

Stasiun PSDKP Biak menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk

penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Dasar

Pengukuran

A.4. Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Stasiun Pengawasan SDKP Biak dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan

dalam mata uang rupiah.

Kebijakan Akuntansi

A.5. Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun 2023 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Dirjen Perbendaharaan Nomor 42 Tahun 2014 yang merupakan entitas pelaporan dari Stasiun PSDKP Biak. Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Sehubungan dengan Implementasi Metode Penilaian Persediaan secara *First In First Out* (FIFO) di tahun 2021 sesuai Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor S-3/PB/PB.6/2021 tanggal 22 Januari 2021, maka pencatatan transaksi mutasi persediaan baik persediaan masuk dan persediaan keluar agar dilakukan sesuai dengan urutan kronologis transaksi. Kebijakan-kebijakan akuntansi penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Stasiun PSDKP Biak adalah sebagai berikut:

Pendapatan- LRA

(1) Pendapatan- LRA

- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).

- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettanya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Pendapatan-LO

(2) Pendapatan- LO

- Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan /atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Secara khusus pengakuan pendapatan-LO pada Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan adalah sebagai berikut:
 - Penerimaan Negara Bukan Pajak
- Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettanya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Belanja

(3) Belanja

- Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening

Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.

- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Beban

(4) Beban

- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Aset

(5) Aset

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

Aset Lancar

a. Aset Lancar

- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.
- Investasi Jangka Pendek BLU dalam bentuk surat berharga disajikan sebesar nilai perolehan sedangkan investasi dalam bentuk deposito dicatat sebesar nilai nominal.
- Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a) Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
 - b) Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal
- Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas

kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Perhitungan penyisihannya adalah :

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0.5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	1. Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan	100%
	2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	

- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Perbedaharaan/Ganti Rugi (TP/TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TP/TGR atau Bagian Lancar TPA.
- Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:
 - harga pembelian terakhir, apabila diperoleh

- dengan pembelian;
- harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
- harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

Aset Tetap

b. Aset Tetap

- Nilai aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:
 - a. Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp1 .000.000 (satu juta rupiah);
 - b. Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah);
 - c. Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai beban kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.
- Pemerintah melakukan penilaian kembali (revaluasi) berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2017 tentang Penilaian Kembali Barang Milik Negara/Daerah dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.06/2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kembali Barang

Milik Negara. Revaluasi dilakukan terhadap aset tetap berupa Tanah, Gedung dan Bangunan, serta Jalan, Jaringan, dan Irigasi berupa Jalan Jembatan dan Bangunan Air pada Kementerian Negara/Lembaga sesuai kodefikasi Barang Milik Negara yang diperoleh sampai dengan 31 Desember 2015. Termasuk dalam ruang lingkup objek revaluasi adalah aset tetap pada Kementerian/Lembaga yang sedang dilaksanakan Pemanfaatan. Pelaksanaan penilaian dalam rangka revaluasi dilakukan dengan pendekatan data pasar, pendekatan biaya, dan/atau pendekatan pendapatan oleh Penilai Pemerintah di lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Kementerian Keuangan. Revaluasi dilakukan pada tahun 2018 dan 2019. Berdasarkan pertimbangan efisiensi anggaran dan waktu penyelesaian, pelaksanaan penilaian dilakukan dengan survei lapangan untuk objek penilaian berupa Tanah dan tanpa survei lapangan untuk objek penilaian selain Tanah.

- Nilai aset tetap hasil penilaian kembali menjadi nilai perolehan baru dan nilai akumulasi penyusutannya adalah nol. Dalam hal nilai aset tetap hasil revaluasi lebih tinggi dari nilai buku sebelumnya maka selisih tersebut diakui sebagai penambah ekuitas pada Laporan Keuangan. Namun, apabila nilai aset tetap hasil revaluasi lebih rendah dari nilai buku sebelumnya maka selisih tersebut diakui sebagai pengurang ekuitas pada Laporan Keuangan.
- Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan

operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-Lain pada pos Aset Lainnya.

- Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada usulan penghapusan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN.

Penyusutan Aset Tetap

c. Penyusutan Aset Tetap

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap.
- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
 - a. Tanah;
 - b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP); dan
 - c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.
- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan

menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.

- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa manfaat Aset Tetap

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun
Jalan, Jaringan dan Irigasi	5 s.d 40 tahun
Aset Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)	4 tahun

*Piutang
Jangka
Panjang*

d. Piutang Jangka Panjang

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan/dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan.

Aset Lainnya

e. Aset Lainnya

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.
- Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai tercatat neto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.
- Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.
- Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah disajikan sebesar nilai buku yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

Kewajiban

(6) Kewajiban

- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.
 - a. Kewajiban Jangka Pendek
Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

- Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

Ekuitas

(7) Ekuitas

Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

Implementasi Akuntansi Pemerintah Berbasis AkruaI Pertama Kali

(8) Implementasi Akuntansi Berbasis AkruaI Pertama Kali

Mulai tahun 2015 Pemerintah mengimplementasikan akuntansi berbasis akrual sesuai dengan amanat PP No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Implementasi tersebut memberikan pengaruh pada beberapa hal dalam penyajian laporan keuangan. Pertama, Pos-pos ekuitas dana pada neraca per 31 Desember 2014 yang berbasis *cash toward*

accrual direklasifikasi menjadi ekuitas sesuai dengan akuntansi berbasis akrual. Kedua, keterbandingan penyajian akun-akun tahun berjalan dengan tahun sebelumnya dalam Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas tidak dapat dipenuhi. Hal ini diakibatkan oleh penyusunan dan penyajian akuntansi berbasis akrual pada tahun 2015 adalah merupakan implementasi yang pertama.

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Selama periode berjalan, Stasiun Pengawasan SDKP Biak telah mengadakan 8 (delapan) kali revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dari DIPA awal. Revisi tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut;

- Revisi DIPA ke-1 dilaksanakan pada tanggal 18 Januari 2024 dengan perubahan anggaran berikut:
 1. Penghapusan detail honor petugas keamanan. Pengemudi Stasiun PSDKP Biak
 2. Pengurangan Pagu anggaran honor petugas kebersihan/pramubakti Stasiun PSDKP Biak sebesar Rp200.880.000,- (Dua Ratus Juta Delapa Ratus Delapan Puluh Rupiah)
 3. Penghapusan detail honor THR Keagamaan petugas keamanan dan Pengemudi
 4. Pengurangan pagu anggaran detail THR Keagamaan petugas kebersihan/Pramubakti Stasiun dan Satwas sebesar Rp16.740.000,- (Enam belas juta tujuh ratus

empat puluh ribu rupiah)

5. Pengurangan pagu anggaran detail Uang lembur PPNPN Sebesar Rp92.352.000,- (Sembilan puluh dua juta tiga ratus lima puluh dua ribu rupiah)
6. Pengurangan pagu anggaran detail Uang makan lembur PPNPN Sebesar Rp54.000.000,- (Lima puluh empat juta rupiah)
7. Penambahan pagu anggaran detail Jamuan Tamu sebesar Rp154.000,- (Seratus lima puluh empat ribu rupiah)
8. Penambahan detail pagu anggaran belanja jasa petugas keamanan sebesar Rp316.413.000,- (Tiga ratus enam belas juta empat ratus tiga belas rupiah)
9. Penambahan detail pagu anggaran belanja jasa penemudi Operasional sebesar Rp63.282.000,- (Enam puluh tiga juta dua ratus delapan puluh dua ribu rupiah)
10. Penambahan detail pagu anggaran belanja jasa Pramubakti sebesar Rp230.094.000,- (Dua ratus tiga puluh juta sembilan puluh empat rupiah)
11. Penambahan detail pagu anggaran belanja jasa petugas kebersihan sebesar Rp57.523.000,- (Lima puluh juta lima ratus dua puluh tiga ribu rupiah)
12. Penambahan detail pagu anggaran belanja jasa THR Keagamaan petugas keamanan sebesar Rp26.367.000,- (Dua puluh enam juta tiga ratus enam puluh tujuh ribu rupiah)
13. Penambahan detail pagu anggaran belanja jasa THR Keagamaan pengemudi operasional sebesar Rp5.273.000,- (Lima juta dua ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah)
14. Penambahan detail pagu anggaran belanja jasa THR

Keagamaan Pramubakti sebesar Rp19.174.000,-
(Sembilan belas juta seratus tujuh puluh empat ribu
rupiah)

15. Penambahan detil pagu anggaran belanja jasa THR
Keagamaan petugas kebersihan sebesar Rp4.793.000,-
(Empat juta tujuh ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah)
 16. Pengurangan pagu anggaran detil Laptop sebesar
Rp6.999.000,- (Enam juta sembilan ratus sembilan puluh
sembilan ribu rupiah)
 17. Penamabahan detil pagu anggaran Drone sebesar
Rp7000.000,- (Tujuh juta rupiah)
- Revisi DIPA ke-2 dilaksanakan pada tanggal 19 Januari
2024 dengan perubahan anggaran berikut:
 1. Pengurangan pagu anggaran detil Bahan bakar minyak
(1 unit kapal) sebesar Rp920.185.000,- (Sembilan ratus
dua puluh juta seratus delapan puluh lima rupiah)
 2. Pengurangan pagu anggaran detil Pelumas (1 unit kapal)
sebesar Rp8.079.000,- (Delapan juta tujuh puluh
sembilan rupiah)
 3. Pengurangan pagu anggaran detil Biaya angkut BBM (1
unit kapal) sebesar Rp8.764.000,- (Delapan juta tujuh
ratis enam puluh empat rupiah)
 4. Penambahan pagu ananggaran detil Uang jaga sandar
Kapal Hiu Macan 04 sebesar Rp3.632.000,- (Tiga juta
enam ratus tiga puluh dua ribu rupiah)
 5. Pengurangan pagu anggaran detil biaya delegasi KP HIU
Macan 04 sebesar Rp34.400.000,- (Tiga puluh empat
juta empat ratus ribu rupiah)
 6. Pengurangan pagu anggaran detil Konsumsi rapat
evaluasi gelar operasi KP. Hiu Macan 04 sebesar

- Rp414.000,- (Empat ratus empat belas ribu rupiah)
7. Pengurangan pagu anggaran detil Docking kapal pengawas sebesar Rp66.000.000,- (Enam puluh enam juta rupiah)
 8. Penghapusan pagu anggaran detil Service perlengkapan navigasi dan komunikasi sebesar Rp300.000.000,- (Tiga ratus juta rupiah)
 9. Penghapusan pagu anggaran detil Konsumsi rapat perencanaan pengawasan pencemaran laut sebesar Rp500.000,- (Lima ratus ribu rupiah)
 10. Penghapusan pagu anggaran detil Perlengkapan peserta dan panitia sebesar Rp30.000.000 (Tiga puluh juta rupiah)
 11. Penghapusan pagu anggaran detil ATK sebesar Rp500.000,- (Lima ratus ribu rupiah)
 12. Penghapusan pagu anggaran detil Konsumsi kegiatan sosialisasi sebesar Rp5.640.000,- (Lima juta enam ratus empat puluh ribu rupiah)
 13. Penghapusan pagu anggaran detil Spanduk sebesar Rp250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah)
- Revisi DIPA ke-3 dilaksanakan pada tanggal 13 Februari 2024 dengan perubahan anggaran berikut:
 1. Penambahan detil perjalanan dinas biasa perjalanan dinas perencanaan pembangunan prasarana pengawasan SDKP sebesar Rp16.873.000,- (Enam belas juta delapan ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah)
 2. Penambahan detil perjalanan dinas biasa perjalanan dinas Monitoring dan Evaluasi pembangunan prasarana pengawasan SDKP sebesar Rp50.619.000,- (Lima puluh juta enam ratus sembilan belas ribu rupiah)

3. Pengurangan pagu anggaran detail Air bersih (1 unit kapal) sebesar Rp2.800.000,- (Dua juta delapan ratus ribu rupiah)
4. Penambahan pagu anggaran detail Pelumas (1 unit kapal) sebesar Rp2.800.000,- (Dua juta delapan ratus ribu rupiah)
5. Penambahan detail Perjalanan dinas dalam rangka Monitoring dan evaluasi speedboat pengawas Rp8.640.000,- (Delapan juta enam ratus empat puluh ribu rupiah)
6. Penambahan detail Perjalanan dinas pengendalian docking sebesar Rp20.250.000,- (Dua puluh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah)
7. Penambahan detail Perjalanan dinas dalam rangka pengendalian perawatan darurat kapal pengawas sebesar Rp13.500.000,- (Tiga belas juta lima ratus ribu rupiah)
8. Penambahan detail perjalanan dinas Narasumber/peserta pusat sebesar Rp12.600.000,- (Dua belas juta enam ratus ribu rupiah)
9. Penambahan detail Perjalanan dinas koordinasi dengan instansi terkait sebesar Rp.12.000.000,- (Dua belas juta rupiah)
10. Penambahan detail perjalanan dinas dalam rangka menghadiri ekspose kasus pengenaan sanksi administratif pangkalan/stasiun/satwas/wilker SDKP sebesar Rp30.000.000,- (Tiga puluh juta rupiah)
11. Penambahan detail perjalanan dinas dalam rangka pencemaran perairan sebesar Rp17.260.000,- (Tujuh belas juta dua ratus enam puluh ribu rupiah)

12. Penambahan detil perjalanan dinas konsultasi perencanaan pemeriksaan kepatuhan unit usaha SDK ke Provinsi sebesar Rp6.936.000,- (Enam juta sembilan ratus tiga puluh enam ribu rupiah)
13. Penambahan detil perjalanan dinas pengawasan pemanfaatan ruang laut luar kota sebesar Rp22.368.000,- (Dua puluh dua juta tiga ratus enam puluh delapan rupiah)
14. Penambahan detil perjalanan dinas koordinasi pengawasan pemanfaatan ruang laut ke Loka PSPL Sorong sebesar Rp22.334.000,- (Dua puluh dua juta tiga ratus tiga puluh empat ribu rupiah)
15. Penambahan detil perjalanan dinas koordinasi hasil evaluasi pemeriksaan kepatuhan unit usaha SDK ke provinsi sebesar Rp13.872.000,- (Tiga belas juta delapan ratus tujuh puluh dua ribu rupiah)
16. Penambahan detil perjalanan dinas koordinasi perencanaan pemeriksaan kepatuhan unit usaha perikanan yang di awasai dari kegiatan penangkapan ikan yang merusak ke provinsi sebesar Rp5.038.000,- (Lima juta tiga puluh delapan ribu rupiah)
17. Penambahan detil Paket E-Drive sebesar Rp1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah)
18. Penambahan detil Paket vidio converence sebesar Rp2.593.000,- (Dua juta lima ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah)
19. Pengurangan pagu anggaran deti Jamuan tamu sebesar Rp4.093.000,- (Empat juta sembilan puluh tiga ribu rupiah)
20. Penambahan detil perjalan dinas Ujian dinas kenaikan

pangkat/penyesuaian ijazah sebesar Rp47.320.000,-
(Empat puluh tujuh juta tiga ratus dua puluh ribu
rupiah)

21. Penambahan detil Perjalanan dinas pengambilan sumpah jabatan pengawas fungsioanal dan strutural sebesar Rp23.550.000,- (Dua puluh tiga juta lima ratus lima puluh ribu rupiah)
22. Penambahan detil perjalana dinas Monev SDMA sebesar Rp11.830.000,- (Sebelas juta delapan ratus tiga puluh ribu rupiah)
23. Penambahan detil perjalanan dinas Pindah Tugas pegawai sebesar Rp21.700.000,- (Dua puluh satu juta tujuh ratus ribu rupiah)
24. Penambahan detil perjalanan dinas Uji kompetensi Jabfung pengawas perikanan sebesar Rp23.660.000,- (Dua puluh tiga juta enam ratus enam puluh ribu rupiah)
25. Penambahan detil perjalanan dinas Pembinaan dan fasilitasi Administrasi PPNS sebesar Rp11.830.000,- (sebelas juta delapan ratus tiga puluh ribu rupiah)
26. Penambahan detil perjalanan dinas Rakernis sebesar Rp36.000.000,- (Tiga puluh enam juta rupiah)
27. Penambahan detil perjalanan dinas Ratekcan sebesar Rp.33.000.000,- (Tiga puluh tiga juta rupiah)
28. Penambahan detil perjalanan dinas Finalisasi sebesar Rp33.000.000,- (Tiga puluh tiga juta rupiah)
29. Penamabahan detil perjalanan dinas ke kanwil sebesar Rp7.100.000,- (Tujuh juta seratis ribu rupiah)
30. Penambahan detil perjalaan dinas Monev UPT sebesar Rp24.000.000,- (Dua puluh empat juta rupiah)

31. Penambahan detail perjalanan dinas Monev satwas sebesar Rp24.000.000,- (Dua puluh empat juta rupiah)
 32. Penambahan detail perjalanan dinas Rekonsiliasi penyusunan laporan keuangan semester II 2023 sebesar Rp22.750.000,- (Dua puluh dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
 33. Penambahan detail perjalanan dinas monev pengelolaan arsip dan persuratan di pusat sebesar Rp28.473.000,- (Dua puluh delapan juta empat ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah)
- Revisi DIPA ke-4 dilaksanakan pada tanggal 19 Februari 2024 dengan perubahan anggaran berikut:
 1. Penambahan detail perjalanan dinas dalam rangka konsultasi teknis pengawasan SDKP sebesar Rp323.705.000,- (Tiga ratus dua puluh tiga juta tujuh ratus lima ribu rupiah)
 2. Penambahan perjalanan dinas dalam rangka koordinasi penerapan sanksi administratif ke pusat sebesar Rp20.913.000,- (Dua puluh juta sembilan ratus tiga belas ribu rupiah)
 3. Penambahan detail perjalanan dinas dalam rangka evaluasi pemeriksaan kepatuhan unit usaha SDK ke pusat sebesar Rp14.053.000,- (Empat belas juta Lima puluh tiga ribu rupiah)
 4. Penambahan detail perjalanan dinas Rekonsiliasi BMN SMT II 2023 dan SMT I 2024 sebesar Rp15.089.000,- (Lima belas juta delapan puluh sembilan ribu rupiah)
 5. Penambahan detail perjalanan dinas Undangan/Bimtek/Koordinasi sebesar Rp157.620.000,- (Seratus lima puluh tujuh juta enam ratus dua puluh

ribu rupiah)

6. Penambahan detil perjalanan dinas Pimpinan sebesar Rp225.337.000,- (Dua ratus dua puluh lima juta tiga ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah)
 7. Perubahan detil Kompresor selam menjadi Compresor udara
 8. Pengurangan dan perubahan detil Drone menjadi Kamera Udara sebesar Rp1000.000,- (Satu juta rupiah)
 9. Pengurangan pagu anggaran detil Kendaraan roda 4 pengangkut logistik kapal sebesar Rp37.094.000,- (Tiga puluh juta sembilan puluh empat ribu rupiah)
 10. Penambahan pagu anggaran detil Kendaraan roda 4 pengangkut logistik kapal sebesar Rp37.094.000,- (Tiga puluh juta sembilan puluh empat ribu rupiah)
 11. Penambahan detil perjalanan dinas Monev semester I tahun 2024 sebesar Rp32.181.000,- (Tiga puluh dua juta seratus delapan puluh satu ribu rupiah)
- Revisi DIPA ke-5 dilaksanakan pada tanggal 22 April 2024 dengan perubahan anggaran berikut:
 1. Penambahan pagu anggaran detil Belanja tunjangan PPH PNS (ke-14) sebesar Rp4.856.000,- (Empat juta delapan ratus lima puluh enam ribu rupiah)
 2. Penambahan pagu anggaran detil Tunjangan kinerja PNS (ke-14) sebesar Rp87.218.000,- (Delapan puluh tujuh juta dua ratus delapan belas ribu rupiah)
 3. Penambahan pagu anggaran detil Tunjangan kinerja PPPK (ke-14) sebesar Rp7.452.000,- (Tujuh juta empat ratus lima puluh dua ribu rupiah)
 4. Penambahan pagu anggaran detil Belanja gaji pokok

- PPPK (ke-14) sebesar Rp7.452.000,- (Tujuh juta empat ratus lima puluh dua ribu rupiah)
5. Penambahan pagu anggaran detail Tunjangan suami/istri PPPK (ke-14) sebesar Rp570.000,- (Lima ratus tujuh puluh ribu rupiah)
 6. Penambahan pagu anggaran detail Tunjangan anak PPPK (ke-14) sebesar Rp69.000,- (Enam puluh sembilan ribu rupiah)
 7. Penambahan pagu anggaran detail Tunjangan Fungsional PPPK (ke-14) sebesar Rp480.000,- (Empat ratus delapan puluh ribu rupiah)
 8. Pengurangan pagu anggaran pembayaran tunjangan kinerja PPPK sebesar Rp8.571.000,- (Delapan juta lima ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)
- Revisi DIPA ke-6 dilaksanakan pada tanggal 30 Mei 2024 dengan perubahan anggaran berikut:
 1. Penambahan pagu anggaran detail Translok pelaksanaan dan tindak lanjut pengawasan perikanan stasiun PSDKP Jayapura sebesar Rp 450.000,- (Empat ratus lima puluh ribu rupiah)
 2. Pengurangan pagu anggaran pelaksanaan dan tindak lanjut pengawasan perikanan stasiun PSDKP Manokwari sebesar Rp450.000,- (Empat ratus lima puluh ribu rupiah)
 3. Pengurangan pagu anggaran detail Belanja gaji pokok PNS (ke-14) sebesar Rp1.946.000,- (Satu juta sembilan ratus empat puluh enam ribu rupiah)
 4. Pengurangan pagu anggaran detail Belanja gaji pokok PNS (ke-13) sebesar Rp919.000,- (Sembilan ratus sembilan belas ribu rupiah)

5. Pengurangan pagu anggaran detail Belanja tunjangan suami/istri (ke-14) sebesar Rp204.000,- (Dua ratus empat ribu rupiah)
6. Pengurangan pagu anggaran detail Belanja tunjangan suami/istri (ke-13) sebesar Rp129.000,- (Seratus dua puluh sembilan ribu rupiah)
7. Penambahan pagu anggaran detail Belanja tunjangan anak (ke-13) sebesar Rp100.000,- (Seratus ribu rupiah)
8. Pengurangan pagu anggaran detail Belanja tunjangan fungsional (ke-14) sebesar Rp400.000,- (Empat ratus ribu rupiah)
9. Pengurangan pagu anggaran detail Belanja tunjangan fungsional (ke-13) sebesar Rp670.000,- (Enam ratus tujuh puluh ribu rupiah)
10. Penambahan pagu anggaran detail Belanja tunjangan PPH PNS (ke-13) sebesar Rp4.843.000,- (Empat juta delapan ratus empat puluh tiga ribu rupiah)
11. Pengurangan pagu anggaran detail Belanja tunjangan umum (ke-13) sebesar Rp550.000,- (Lima ratus lima puluh ribu rupiah)
12. Penambahan pagu anggaran detail Tunjangan PNS (ke-13) sebesar Rp88.958.000,- (Delapan puluh delapan juta sembilan ratus lima puluh delapan ribu rupiah)
13. Pengurangan pagu anggaran detail Tunjangan PNS sebesar Rp97.654.000,- (Sembilan puluh tujuh juta enam ratus lima puluh empat ribu rupiah)
14. Penambahan pagu anggaran detail belanja gaji pokok PPPK (ke-13) sebesar Rp7.452.000,- (Tujuh juta empat ratus lima puluh dua ribu rupiah)
15. Penambahan pagu anggaran detail belanja tunjangan

- suami/istri PPPK (ke-13) sebesar Rp570.000,-
16. Penambahan pagu anggaran detail belanja tunjangan anak PPPK (ke-13) sebesar Rp69.000,- (Enam puluh sembilan ribu rupiah)
 17. Penambahan pagu anggaran detail belanja tunjangan fungsional PPPK (ke-13) sebesar Rp480.000,- (Empat ratus delapan puluh ribu rupiah)
 18. Pengurangan pagu anggaran detail Perpanjangan STNK kendaraan roda 4 pengangkut logistik kapal pengawas sebesar Rp99.000,- (Sembilan puluh sembilan ribu rupiah)
 19. Penambahan pagu anggaran detail Perpanjangan STNK kendaraan roda 4 Pimpinan sebesar Rp99.000,- (Sembilan puluh sembilan ribu rupiah)
- Revisi DIPA ke-7 dilaksanakan pada tanggal 9 Juli 2024 dengan perubahan anggaran berikut:
 1. Pengurangan pagu anggaran detail Belanja gaji pokok PPPK Sebesar Rp462.000,- (Empat ratus enam puluh dua ribu rupiah)
 2. Penambahan pagu anggaran detail Belanja tunjangan suami/istri PPPK Sebesar Rp462.000,- (Empat ratus enam puluh dua ribu rupiah)
 - Revisi DIPA ke-8 dilaksanakan pada tanggal 13 Agustus 2024 dengan perubahan anggaran berikut:
 1. Penambahan detail pagu anggaran Pengadaan perlengkapan kapal pengawas- Ekstrakomptabel sebesar Rp6.694.000,- (Enam juta enam ratus sembilan puluh empat ribu rupiah)
 2. Pengurangan pagu anggaran detail Perawatan darurat

kapal pengawas sebesar Rp6.694.000,- (Enam juta enam ratus sembilan puluh empat ribu rupiah)

3. Pengurangan pagu anggaran detil Transport lokal pelaksanaan tindak lanjut pengawasan perikanan Stasiun PSDKP Manokwari sebesar Rp750.000,- (Tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
 4. Penambahan pagu anggaran Transport lokal pelaksanaan tindak lanjut pengawasan perikanan Stasiun PSDKP Nabire sebesar Rp750.000,- (Tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
 5. Penambahan pagu anggaran detil Konsumsi Rapat Sebesar Rp2.002.000,- (Dua juta dua ribu rupiah)
 6. Pengurangan pagu anggaran detil perjalanan dinas dalam rangka apel siaga korps kelautan dan perikanan tahun 2024 sebesar Rp1.022.000,- (Satu juta dua puluh dua ribu rupiah)
 7. Pengurangan pagu anggaran detil perjalanan dinas Monev Pelaksanaan Pengawasan Perikanan Berbasis Resiko Sebesar Rp980.000,- (Sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah)
- Revisi Dipa ke-9 dilaksanakan pada tanggal 14 Oktober 2024 dengan perubahan anggaran berikut:
 1. Pengurangan pagu anggaran detil Belanja Gaji Pokok PNS Sebesar Rp2000,- (Dua Ribu Rupiah)
 2. Penambahan pagu anggaran detil belanja Pembulatan Gaji PNS Sebesar Rp2000,- (Dua Ribu Rupiah)
 - Revisi Dipa ke-10 dilaksanakan pada tanggal 14 Oktober 2024 dengan perubahan anggaran berikut:
 1. Penambahan detil Service Perlengkapan Navigasi dan

Komunikasi Sebesar Rp366.000.000,- (Tiga Ratus Enam Puluh Enam Juta Rupiah)

- Revisi DIPA ke-11 dilaksanakan pada tanggal 19 November 2024 dengan perubahan anggaran berikut:
 1. Penambahan pagu anggaran detail Konsumsi Administrasi Penyidikan sebesar Rp27.017.000,- (Dua puluh tujuh juta tujuh belas ribu rupiah)
 2. Penambahan pagu anggaran detail Transportasi Lokal Saksi sebesar Rp900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah)
 3. Pengurangan pagu anggaran detail Perdin dalam rangka pemberkasan perkara kasus TPKP sebesar Rp1.773.000,- (Satu juta tujuh ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah)
 4. Penghapusan detail anggaran Perdin dalam rangka koordinasi TPKP sebesar Rp26.144.000,- (Dua puluh enam juta seratus empat puluh empat ribu rupiah)
 5. Penghapusan detail anggaran Perlengkapan peserta dan panitia sebesar Rp9.200.000,- (Sembilan juta dua ratus ribu rupiah)
 6. Pengurangan pagu anggaran detail Konsumsi kegiatan Sosialisasi sebesar Rp650.000,- (Enam ratus lima puluh ribu rupiah)
 7. Penambahan pagu anggaran detail Perdin peningkatan teknis dan sertifikasi kompetensi sistem informasi geografis (SIG) sebesar Rp9.850.000,- (Sembilan juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah)
 8. Penambahan pagu anggaran detail Sewa perahu motor stasiun PSDKP Biak sebesar Rp4.312.000,- (Empat juta tiga ratus dua belas ribu rupiah)
- Revisi DIPA ke-12 dilaksanakan pada tanggal 20

November 2024 dengan perubahan anggaran berikut:

1. Pemblokiran pagu anggaran Transport lokal dan perjalanan dinas Sebesar Rp100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah)
 - Revisi DIPA ke-13 dilaksanakan pada tanggal 26 November 2024 dengan perubahan anggaran berikut:
 1. Penambahan pagu anggaran detail perjalanan dinas bimtek/koordinasi sebesar Rp126.120.000,- (Seratus dua puluh enam juta seratus dua puluh ribu rupiah)
 2. Pengurangan pagu anggaran detail Belanja gaji pokok PNS Sebesar Rp85.139.000,- (Delapan puluh lima juta seratus tiga puluh sembilan ribu rupiah)
 3. Pengurangan pagu anggaran detail Belanja Tunjangan suami/istri Sebesar Rp1.350.000,- (Satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah)
 4. Pengurangan pagu anggaran detail Belanja Tunjangan anak Sebesar Rp138.000,- (Seratus tiga puluh delapan ribu rupiah)
 5. Pengurangan pagu anggaran detail Belanja Tunjangan fungsional Sebesar Rp6.830.000,- (Enam juta delapan ratus tiga puluh ribu rupiah)
 6. Penambahan pagu anggaran Tunjangan Kinerja PNS Sebesar Rp192.340.000,- (Seratus sembilan puluh dua ribu tiga ratus empat puluh ribu rupiah)
 - Revisi DIPA ke-14 dilaksanakan pada tanggal 13 Desember 2024 dengan perubahan anggaran berikut:
 1. Pengurangan pagu anggaran detail Belanja gaji pokok PNS sebesar Rp3.288.000,- (Tiga juta dua ratus delapan puluh delapan ribu rupiah)
 2. Penambahan pagu anggaran detail Uang makan sebesar

Rp1.212.000,- (Satu juta dua ratus dua belas ribu rupiah)

3. Penambahan pagu anggaran detil Uang lembur gol II Sebesar Rp24.000,- (Dua Puluh Empat Ribu Rupiah)
4. Pengurangan pagu anggaran detil Uang makan lembur gol II sebesar Rp35.000,- (Tiga puluh lima ribu rupiah)
5. Pengurangan pagu anggaran detil Uang lembur gol III sebesar Rp4.170.000,- (Empat juta seratus tujuh puluh ribu rupiah)
6. Penambahan pagu anggaran detil Uang lembur gol IV Sebesar Rp.36.000,- (Tiga puluh enam ribu)
7. Penambahan pagu anggaran Tunjangan kinerja PNS Sebesar Rp4.245.000,- (Empat juta dua ratus empat puluh lima rupiah)
8. Pengurangan pagu anggaran detil Belanja gaji pokok PPPK Sebesar Rp393.000,- (Tiga ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah)
9. Pengurangan pagu anggaran Uang Makan PPPK Sebesar Rp421.000,- (Empat ratus dua puluh satu ribu rupiah)
10. Penambahan pagu anggaran detil Belanja uang lembur PPPK golongan V dan VII sebesar Rp2.256.000,- (Dua juta dua ratus lima puluh enam ribu rupiah)
11. Pengurangan pagu anggaran detil belanja uang lembur PPPK golongan IX Sebesar Rp90.000,- (Sembilan puluh ribu rupiah)
12. Penambahan pagu anggaran detil belanja uang makan lembur PPPK golongan IX Sebesar Rp111.000,- (Seratus sebelas ribu rupiah)
13. Pengurangan pagu anggaran Tunjangan Kinerja PPPK

Sebesar Rp329.000,-
(Tiga ratus dua puluh sembilan ribu rupiah)

- Revisi DIPA ke-15 dilaksanakan pada tanggal 20 Desember 2024 dengan perubahan anggaran berikut:
 1. Pengurangan pagu anggaran detail Uang makan PNS sebesar Rp3.700.000,- (Tiga juta tujuh ratus ribu rupiah)
 2. Penambahan pagu anggaran Belanja uang lembur sebesar Rp1.558.000,- (Satu juta lima ratus lima puluh delapan rupiah)
 3. Penambahan pagu anggaran Tunjangan kinerja PNS sebesar Rp300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah)
 4. Penambahan pagu anggaran detail Belanja gaji pokok PPPK sebesar Rp300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah)
 5. Penambahan pagu anggaran Belanja uang lembur sebesar PPPK sebesar Rp728.000,- (Tujuh ratus dua puluh delapan rupiah)

Terdapat perubahan pagu total dari pagu alokasi pada Tahun 2024 senilai Rp24.894.597.000 menjadi 24.820.597.000,00. Anggaran yang diblokir dalam rangka cadangan automatic adjustment sebesar Rp1.179.283.000 (Satu miliar seratus tujuh puluh sembilan ribu dua ratus delapan puluh tiga ribu rupiah).

URAIAN	PAGU ALOKASI	PAGU REVISI	SELISIH
Belanja Pegawai	7.117.436.000	7.043.436.000	-
Belanja Barang	16.226.759.000	16.226.759.000	-
Belanja Modal	1.550.402.000	1.550.402.000	-
Total	24.894.597.000	24.820.597.000	-

*Realisasi
Pendapatan
Rp23.691.74
0,00*

B.1 Pendapatan

Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 30 September 2024 dan 30 September 2023 adalah masing-masing sebesar Rp23.691.740,00 dan Rp11.886.636,00. Pendapatan (Pendapatan Negara Bukan Pajak) tahun anggaran 2024 adalah pendapatan yang diperoleh dari beberapa jenis pendapat sebagai berikut:

1. Pendapatan sewa bangunan Negara sebesar Rp3.162.536,00 terdiri dari : Pendapatan sewa bangunan Negara pada Bulan Januari 2024 sebesar **Rp790.634,00** sesuai dengan dokumen SPM Nomor 001A, Pendapatan sewa bangunan Negara pada Bulan Februari 2024 sebesar **Rp790.634,00** sesuai dengan dokumen SPM Nomor 005A, Pendapatan sewa bangunan Negara pada Bulan Maret 2024 sebesar **Rp790.634,00** sesuai dengan dokumen SPM Nomor 0102A, Pendapatan sewa bangunan Negara pada Bulan April 2024 sebesar **Rp790.634,00** sesuai dengan dokumen SPM Nomor 075T;
2. Pendapatan dari penjualan 1 paket peralatan dan mesin inventaris kantor sebesar **Rp2.049.700,00** dengan sesuai dengan Risalah Lelang nomor 67/17.04/2024-01 tanggal 30 Mei 2024 dengan nomor NTPN : 865263CIFKA1IVSD dan NTB : 240603306184;

3. Pendapatan dari penerimaan kembali belanja barang tahun anggaran yang lalu berupa Pengembalian Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Tahun 2023 sebesar **Rp4.024.504,00** telah disetorkan pada tanggal 07 Februari 2024 5dengan nomor NTPN : AD42B2G4VPBRIU59 dan NTB : 240207520851;
4. Pendapatan dari penerimaan kembali belanja pegawai tahun anggaran yang lalu berupa Pengembalian Belanja Pegawai Tahun 2021-2023 **Rp10.955.000,00** terdiri dari :
 - a. Pengembalian Belanja Pegawai Tunjangan Jabatan Umum Pegawai yang melaksanakan Tugas Belajar Tahun 2021 Pegawai An. Apyam Mei Kbarek sebesar Rp1.980.000,00 yang telah disetorkan pada tanggal 07 Mei 2024 dengan Nomor NTPN : 991CF48VVEPJ501S dan NTB 240507284175;
 - b. Pengembalian Belanja Pegawai Tunjangan Jabatan Umum Pegawai yang melaksanakan Tugas Belajar Tahun 2022 Pegawai An. Apyam Mei Kbarek sebesar Rp2.520.000,00 yang telah disetorkan tanggal 07 Mei 2024 dengan Nomor NTPN 3C1361QV3UBV0LO dan NTB 240507284077;
 - c. Pengembalian Belanja Pegawai Tunjangan Jabatan Umum Pegawai yang melaksanakan Tugas Belajar Tahun 2023 Pegawai An. Apyam Mei Kbarek sebesar Rp2.570.000,00 yang telah disetorkan tanggal 07 Mei 2024 dengan Nomor NTPN FE53C6U8EUGOC0IP dan NTB 240507283915;
 - d. Pengembalian Belanja Pegawai Tunjangan Jabatan Umum Pegawai yang melaksanakan Tugas Belajar

Tahun 2022 Pegawai An. Charles Audi Katili sebesar Rp2.220.000,00 yang telah disetorkan tanggal 07 Mei 2024 dengan Nomor NTPN 87036CIFK76O04U dan NTB 240507283755;

- e. Pengembalian Belanja Pegawai Tunjangan Jabatan Umum Pegawai yang melaksanakan Tugas Belajar Tahun 2023 Pegawai An. Charles Audi Katili sebesar Rp1.665.000,00 yang telah disetorkan tanggal 07 Mei 2024 dengan Nomor NTPN C0FF355DF9BVI17P dan NTB 240507283656;

- 5. Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara berupa Penyelesaian TGR Motor Hilang An. Taufik Laima sesuai Surat Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor : KEP.104/KEPMEN-KP/PL.790/X/2024 Tentang Pembebanan Penggantian Kerugian Sementara Kepada Saudara Taufik Laima,S.Pi Pegawai Pada Stasiun PSDKP Biak. Kode Billing : 820241112353323, NTB : 241112052649, NTPN : 76DA52G4VQ6QTIHB, Tanggal bayar 12 November 2024, Nilai TGR **Rp3.500.000,00**

Rincian Pendapatan TA 2024 dan TA 2023

AKUN	URAIAN	2024	2023
425131	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	3.162.536	7.115.706
425912	Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	4.024.504	-
425122	Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	2.049.700	4.770.930
425911	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	10.955.000	-
425791	Pendapatan Penyelsaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabata lain	3.500.000	-
	Total	23.691.740	11.886.636

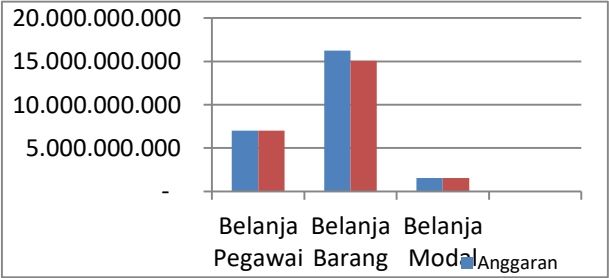
B.2 Belanja

*Realisasi
Belanja
Negara
Rp23.628.485.278,00*

Realisasi Belanja Stasiun Pengawasan SDKP Biak pada TA 2024 adalah sebesar Rp23.628.485.278,00 atau 95% dari anggaran belanja sebesar Rp24.820.597.000,00. Sedangkan Realisasi Belanja Stasiun Pengawasan SDKP Biak pada TA 2023 adalah sebesar Rp24.405.940.972,00 atau 100% dari anggaran belanja sebesar Rp24.413.120.000,00. Rincian anggaran dan realisasi belanja TA 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja TA 2024 dan 2023

URAIAN	31-Dec-23			31-Dec-23	
	ANGGARAN	REALISASI	%	ANGGARAN	REALISASI
Belanja Pegawai	7.043.436.000	7.039.799.010	99,95	5.842.308.000	5.842.286.960
Belanja Barang	16.226.759.000	15.046.790.342	92,73	16.804.496.000	16.798.068.810
Belanja Modal	1.550.402.000	1.549.669.410	99,953	1.766.316.000	1.765.585.200
Total Belanja Kotor	24.820.597.000	23.636.258.762	95,23	24.413.120.000	24.405.940.970
Pengembalian	-	7.773.484		-	
JUMLAH BELANJA	24.820.597.000	23.628.485.278	95,197	24.413.120.000	24.405.940.970



Perbandingan realisasi belanja per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 menunjukkan bahwa dari segi persentase realisasi belanja per 31 Desember 2024 mengalami penurunan dibandingkan dengan realisasi belanja pada 31 Desember 2023. Hal ini disebabkan karena terdapat pagu blokir pada kelompok belanja 52 sebesar Rp1.179.283.000,00 . .

Realisasi Capaian Output Program Nasional
Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Biak
Tahun 2024

Kode	Uraian	Belanja			Keluaran			
		Pagu	Realisasi	Persentase	Target	Satuan	Realis	Progres Capaian
001	Operasi Kapal Pengawas	6,726,075,000	5,756,648,821	85.59%	43	Operasi	43.	100%
003	Operasi Speedboat Pengawas	381,450,000	365,504,601	95.82%	30	Operasi	30	100%
001	Armada Pengawasan SDKP yang Dirawat	3,542,725,000	3,527,248,408	99.56%	3	Unit	3	100%
001	Unit usaha sektor kelautan yang diawasi kepatuhannya	450,000,000	381,274,553	84.73%	7	Lembaga	42	100%

002	Unit Usaha Perikanan yang diawasi dari kegiatan penangkapan ikan yang merusak	75,000,000	74,939,744	99.92%	40	Lembaga	50	100%
004	Unit usaha sektor perikanan yang diawasi kepatuhannya	350,000,000	335,247,470	95.78%	25	Lembaga	35	100%

Belanja

Pegawai

Rp5.842.286.960,00

B.3 Belanja Pegawai

Realisasi Belanja Pegawai Stasiun Pengawasan SKDP Biak pada TA 2024 sebesar Rp7.037.603.314,00 dari pagu anggaran sebesar Rp7.043.436.000,00 sedangkan pada TA 2023 sebesar Rp5.842.286.960,00 dari pagu anggaran sebesar Rp5.842.308.000,00 Belanja Pegawai adalah belanja atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang – undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal. Realisasi belanja Tahun 2024 mengalami peningkatan dari realisasi belanja Tahun 2022 dikarenakan penambahan pegawai PPPK sebanyak 6 orang Pengawas Perikanan Ahli Pertama, 3 orang Pengawas Perikanan Terampil, 3 Pengawas Perikanan Pemula. Belanja Pegawai dibayarkan untuk 57 Pegawai dan 162 Jiwa, yaitu meliputi : Belanja Gaji Pokok PNS, Belanja Pembulatan Gaji PNS, Belanja Tunjangan Suami/Istri PNS, Belanja Tunjangan Anak PNS, Belanja Tunjangan Struktural PNS, Belanja Tunjangan Fungsional,

Belanja Tunjangan Umum, Belanja Tunjangan Beras, Belanja Uang Makan PNS, Belanja Uang Lembur, Belanja Tunjangan Khusus (Tunjangan Kinerja Pegawai), dan Tunjangan Khusus Papua dengan Rincian belanja pegawai adalah sebagai berikut :

Perbandingan Belanja Pegawai TA 2023 dan TA 2022

*Belanja
Barang
Rp15.041.212
.554,00*

URAIAN	REALISASI 31 Desember 2024	REALISASI 31 Desember 2023
Belanja Gaji Pokok PNS	1.983.079.300	1.903.516.980
Belanja Pembulatan Gaji PNS	29.515	36.089
Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	158.474.330	152.645.898
Belanja Tunj. Anak PNS	53.806.928	50.016.916
Belanja Tunj. Struktural PNS	12.600.000	12.600.000
Belanja Tunj. Fungsional PNS	33.680.000	32.210.000
Belanja Tunj. PPh PNS	10.058.697	497.650
Belanja Tunj. Umum PNS	76.990.000	205.053.000
Belanja Tunj. Beras PNS	136.584.120	141.870.780
Belanja Uang Makan PNS	183.323.000	205.053.000
Belanja Uang Lembur PNS	97.398.000	170.808.000
Belanja Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan)	2.582.361.610	2.371.885.206
Belanja Tunjangan Khusus Papua PNS	200.075.000	227.485.000
Belanja Gaji Pokok PPPK	520.166.000	151.959.000
Belanja Pembulatan Gaji PPPK	10.535	3.605
Belanja Tunj. Suami/Istri PPPK	20.985.980	5.452.900
Belanja Tunj. Anak PPPK	4.094.248	1.154.670
Belanja Tunj. Fungsional PPPK	45.240.000	14.100.000
Belanja Tunj. Beras PNS	23.101.980	6.879.900
Belanja Uang Makan PPPK	57.208.000	24.339.000
Belanja Uang Lembur PPK	78.329.000	170.808.000
Belanja Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja PPPK)	705.802.767	221.439.268
Belanja Tunjangan Khusus Papua PPPK	56.400.000	21.000.000
Jumlah Belanja Kotor	7.039.799.010	5.842.288.862
Pengembalian Belanja Pembulatan Gaji PNS	560	1.902
Pengembalian Belanja Tunj. Fungsiona PNS	270.000	
Pengembalian Belanja Tunj. Umum PNS	1.925.000	
Pengembalian Belanja Pembulatan Gaji PPPK	136	
Jumlah Pengembalian Belanja	2.195.696	1.902
Jumlah Belanja	7.037.603.314	5.842.286.960

B.4 Belanja Barang

Realisasi Belanja Barang TA 2024 per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp15.041.212.554 (93%) dari pagu anggaran sebesar Rp16.226.759.000,00 dan TA 2023 per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp16.798.068.812,00 (100%) dari pagu anggaran sebesar Rp16.804.496.000,00. Penyerapan realisasi terbesar ada pada realisasi BBM Kapal Hiu Macan 04. Kapal pengawas tersebut dipergunakan untuk mendukung kegiatan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan serta untuk melakukan pengawasan terhadap kegiatan kapal asing dan kapal indonesia yang melakukan operasional di WPP-RI 717. Selain itu terdapat belanja barang yang diperuntukkan bagi operasional speedboat dan kapal pengawas berupa belanja pelumas, suku cadang, dan pemeliharaan kapal pengawas dan speedboat serta belanja barang untuk mendukung operasional pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan dan penanganan pelanggaran.

- Belanja Barang Operasional pada Stasiun PSDKP Biak antara lain seperti belanja keperluan sehari-hari perkantoran, perpanjangan STNK kendaraan bermotor, penambah daya tahan tubuh, pengiriman pos, honor pengelola anggaran, dan belanja operasional lainnya.
- Belanja barang Non Operasional pada Stasiun PSDKP Biak antara lain seperti pengadaan Bahan Bakar Minyak untuk KP. Hiu Macan 04, belanja bahan makanan untuk AKP, konsumsi kegiatan rapat dan belanja non operasional lainnya.
- Belanja barang persediaan pada Stasiun PSDKP Biak antara lain seperti pengadaan alat tulis kantor, *computer supply*, blanko persuratan, suku cadang KP. HMC 04 dan

Speedboat, daftar arus pasang surut, jurnal dek kapal pengawas, jurnal mesin kapal pengawas, perawatan rutin bulanan kapal pengawas.

- Belanja jasa pada Stasiun PSDKP Biak antara lain seperti belanja langganan listrik, telepon dan air, pengiriman surat dinas, belanja jasa konsultan, belanja sewa .
- Belanja pemeliharaan pada Stasiun PSDKP Biak meliputi : pemeliharaan peralatan dan mesin (contohnya perbaikan darurat kapal pengawas, perawatan rutin *speedboat*, pemeliharaan komputer, laptop, AC, genset, kendaraan dinas, dan lain-lain) dan pemeliharaan gedung dan bangunan (pemeliharaan mess, kantor Stasiun PSDKP Biak, pemeliharaan bangunan operator Stasiun PSDKP Biak, pemeliharaan bangunan fungsional pengawasan, serta pemeliharaan bak air dan pagar).
- Belanja perjalanan dinas pada Stasiun PSDKP Biak meliputi perjalanan dinas biasa, perjalanan dinas dalam kota, dan perjalanan dinas paket meeting luar kota. antara lain seperti transport lokal untuk kegiatan pengawasan Sumber Daya Kelautan (SDK) dan Sumber Daya Perikanan (SDP) diantaranya pengawasan *destructive fishing*, pengawasan SDP dan SDK lainnya; Transport lokal dan perjalanan dinas yang terkait dengan administrasi dan keuangan dan belanja perjalanan dinas dalam negeri lainnya.

Termin	Deskripsi Termin	Nilai Termin	Tanggal SP2D	Tertagihkan	Sisa Termin
1	BBM Kapal Pengawas	474.000.000	25/03/2024	474.000.000	-
2	BBM Kapal Pengawas	237.000.000	22/04/2024	237.000.000	-
3	BBM Kapal Pengawas	370.668.000	23/09/2024	370.668.000	-
4	BBM Kapal Pengawas	324.335.000	23/09/2024	324.335.000	-
5	BBM Kapal Pengawas	227.520.000	09/10/2024	227.520.000	-
6	BBM Kapal Pengawas	445.560.000	09/10/2024	445.560.000	-
7	BBM Kapal Pengawas	421.860.000	7/12/2024	421.860.000	-
8	BBM Kapal Pengawas	316.395.000	7/12/2024	316.395.000	-
9	BBM Kapal Pengawas	316.395.000	12/12/2024	316.395.000	-
10	BBM Kapal Pengawas	209.152.000	06/12/2024	209.152.000	-
11	BBM Kapal Pengawas	209.152.000	18/12/2024	209.152.000	-
12	BBM Kapal Pengawas	522.880.000	18/12/2024	522.880.000	-
13	BBM Kapal Pengawas	424.232.000	18/12/2024	424.232.000	-
		4.499.149.000		4.499.149.000	-

Rincian
Penggunaan
BBM
Kapal
Pengawas
Hiu
Macan
04

Rincian Penggunaan BBM	Jumlah	Satuan
Sisa BBM Bulan Sebelumnya Tgl 30 Nov 2024	46.272	Liter

Jumlah Pengisian	20.000	Liter
Jumlah Pemakaian	23.512	Liter
Volume Akhir Bulan Tgl 31 Desember 2024	42.760	Liter

Realisasi BBM Kapal Pengawas Hiu Macan 04 selama tahun 2024 sebesar Rp4.499.149.000,00 (100%) dari pagu revisi sebesar Rp4.499.150.000,00. Sisa BBM tanggal 30 November 2024 sebanyak 46.272 liter, pengisian pada bulan Desember sebanyak 20.000 liter, jumlah pemakaian selama bulan Desember sebanyak 23.512 liter dan volume akhir per tanggal 31 Desember 2024 sebanyak 42.760 liter yang digunakan untuk stasioner dan rencana operasi selanjutnya.

Perbandingan Belanja Barang TA 2024 dan 2023

URAIAN	REALISASI 31 Desember 2023	REALISASI 31 Desember 2023	NAIK (TURUN) %
Belanja Jasa	1.525.590.021	878.032.046	73,75
Belanja Pemeliharaan	3.430.023.192	1.795.629.907	91,02
Belanja Perjalanan Dinas	2.861.448.540	2.189.413.115	30,69
Belanja Barang Persediaan	97.053.400	129.888.034	(25,28)
Belanja Operasional	1.438.930.522	2.171.300.432	(33,73)
Belanja Non Operasional	5.693.744.667	9.636.940.558	(40,92)
Jumlah Belanja Kotor	15.046.790.342	16.801.204.092	(10,44)
Pengembalian Belanja	5.577.788	3.135.280	-
Jumlah Belanja	15.041.212.554	16.798.068.812	(10,46)

Terdapat pengembalian belanja pada Tahun 2024 senilai Rp5.577.788,00 yang berasal dari :

- Pengembalian Belanja Honor Satuan Kerja (Honorarium Pejabata Pengadaan Barang/Jasa Bulan Januari 2024 sebesar **Rp408.000,00** An. Riswan). Nomor Billing : 702406271103578, NTPN : A7A915229RM2ESIQ, NTB 240628478507;
- Pengembalian belanja senilai Rp3.328.000,00 berasal dari pengembalian belanja perjalanan dinas dalam rangka menghadiri undangan FGD perhitungan total nilai investasi dalam pemanfaatan ruang laut an. Decki senilai **Rp1.460.000,00** yang telah disteorkan pada tanggal 28 Juni 2024 dengan NTPN : 657032CPQBUT7SLH, pengembalian belanja perjalanan dinas dalam rangka menghadiri undangan FGD perhitungan total nilai investasi dalam pemanfaatan ruang laut an. Mochamad Erwin senilai **Rp1.460.000,00** yang telah disteorkan pada tanggal 28 Juni 2024 dengan NTPN : 786001GCAHGQSMG;
- Pengembalian belanja perjalanan dinas an. Andra Aulia Pratama sebesar **Rp179.000,00** kode billing : 702412312061715 telah disetor tanggal 31 Desember 2024;
- Pengembalian Belanja Perjalanan Dinas An. Ariyanti Sastriani sebesar **Rp1.629.600,00** kode billing 702412312060703 telah disetor tanggal 31 Desember 2024;
- Pengembalian belanja perjalanan dinas an. Dominggus P Sanggenafa senilai **Rp441.188,00** kode billing :

702412312061764 telah disetor tanggal 31 Desember 2024.

Belanja

Modal

Rp1.549.669.

410,00

B.5 Belanja Modal

Realisasi Belanja Modal TA 20234 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp1.549.669,00 dan Rp1.765.585.200,00. Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.

Realisasi Belanja Modal pada TA 2024 mengalami penurunan dibandingkan realisasi TA 2023. Belanja Modal tahun 2024 terdiri dari belanja modal peralatan mesin, belanja modal Gedung dan bangunan dan belanja modal perencanaan dan pengawasan Gedung dan bangunan.

Perbandingan Belanja TA 2024 dan 2023

URAIAN	REALISASI 31 Desember 2024	REALISASI 31 Desember 2023	NAIK (TURUN) %
Belanja Modal Tanah		0	0,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	611.700.910	72.885.200	739,27
Belanja Modal Penambahan Nilai Peralatan dan Mesin		1.692.700.000	0,00
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	807.932.000		100,00
Belanja Modal Perencanaan dan Pengawasan Gedung dan Bangunan	130.036.500	0	100,00
Belanja Modal Perjalanan Gedung dan Bangunan			0,00
Konstruksi Dalam Pengerjaan			0,00
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan			100,00
Belanja Modal Perencanaan dan Pengawasan Jalan dan Jembatan			100,00
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	0	0	0,00
Jumlah Belanja Kotor	1.549.669.410	1.765.585.200	(12,23)
Pengembalian	-	-	0,00
Jumlah Belanja	1.549.669.410	1.765.585.200	(12,23)

Belanja

Modal Tanah

Rp0

B.5.1 Belanja Modal Tanah

Realisasi Belanja Modal Tanah TA 2024 dan TA 2023 adalah sebesar Rp0 dikarenakan tidak adanya pembelian modal tanah untuk TA 2024 dan 2023.

Belanja

Modal

Peralatan

dan Mesin

Rp611.700.91

0, 00

B.5.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp611.700.910,00 dimana mengalami penurunan dari Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp Rp72.885.200,00. Rincian Belanja Modal Peralatan dan Mesin adalah sebagai berikut :

Perbandingan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin

TA 2024 dan 2023

URAIAN	REALISASI 31 Desember 2024	REALISASI 31 Desember 2023
Kamera Underwater	12.300.000	
Rak Besi	-	9.990.000
Mesin Pengering Pakaian	5.200.000	
Handy Talky (HT)	3.169.000	
Senter Bawah Air	1.158.560	
Jam Tangan Penyelam	1.488.800	
Printer	19.160.300	
Vertikal Blind	-	28.600.000
Camera Digital	20.868.000	
Masker	3.330.000	
Fins	3.330.000	
Sofa	17.760.000	14.710.000
Mic Video Conference	-	2.885.200
Teropong (Optik)	-	16.700.000
Genset	12.543.000	
Televisi	4.773.000	
Laptop	94.739.400	
Loudspiker	3.885.000	
AC Split	5.550.000	
Kursi Besi/Metal	7.381.500	
Scanner	8.186.250	
Kamera Udara	44.622.000	
PC. Unit	8.658.000	
Tablet PC	23.287.300	
Perahu Karet	157.000.000	
Video Conferencee	3.882.700	
UPS	5.940.000	
Telephone Mobile	3.399.000	
Wetsuit	4.363.500	
Tanks (Tabung Selam)	8.400.000	
BCD	11.807.360	
Clip, selang & Octopus	4.600.620	
Snorkel	2.482.500	
Tandon Air	1.290.000	
Regulator Gauge	3.733.200	
Dive Boots	2.900.000	
Regulator	8.638.820	
Kursi Dorong	3.052.500	
Mesin Pemotong Rumput	9.990.000	
Televisi	28.305.000	
Meja kerja Kayu	21.978.000	
Kursi besi / Metal	10.545.000	
Kamera Udara	18.002.600	
Jumlah Belanja Kotor	611.700.910	72.885.200
Pengembalian	-	-
Jumlah Belanja	611.700.910	72.885.200

Belanja
Modal
Gedung dan
Bangunan
Rp.
807.932.000,0
0

B.5.3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan
Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan per tanggal 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing adalah sebesar Rp807.932.000,00 dan Rp0. Perbandingan realisasi belanja gedung dan bangunan Tahun Anggaran 2024 dan Tahun Anggaran 2023 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Perbandingan Realisasi Belanja Gedung dan Bangunan
TA 2024 dan 2023

URAIAN JENIS BELANJA	REALISASI 31 Desember 2024	REALISASI 31 Desember 2023	NAIK (TURUN) %
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	807.932.000	0	100,00
Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	0	0	0,00
Belanja Pengukuran dan Pematangan Lahan	0	0	0,00
Belanja Modal Perjalanan Gedung dan Bangunan	0	0	0,00
Belanja Modal Perencanaan dan Pengawasan Gedung dan Bangunan			100,00
Jumlah Belanja Kotor	807.932.000	0	100,00
Pengembalian Belanja Modal	-	-	-
Jumlah Belanja	807.932.000	0	100,00

- Rincian Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan adalah:
- Pengadaan Jasa Konstruksi uang muka 30% Pembangunan Konstruksi Pos Security dan Rumah Genset sebesar Rp99.038.700,00 dengan nomor kontrak 315/PPK/PSDKPSta.8/PL.430/XI/2024 tanggal 11 November 2024 dan BAP nomor 334/PPK/PSDKPSta.8/PL.450/XI/2024 tanggal 28 November 2024 dan Jaminan Uang Muka Nomor 18.92.01.070322.tanggal 11.24 26 November 2024;
 - Pengadaan Jasa Konstruksi Pembangunan Pos

Pembangunan Konstruksi Pos Security dan Rumah Genset sebesar Rp237.296.300,00 dengan nomor kontrak 315/PPK/PSDKPSta.8/PL.430/XI/2024 tanggal 11 November 2024, BAP 372/PPK/PSDKPSta.8/PL.450/XII/2024 tanggal 16 Desember 2024 BAST 371/PPK/PSDKPSta.8/PL.450/XII/2024 tanggal 16 Desember 2024;

- Pengadaan Jasa Konstruksi uang muka 30% Pembangunan Konstruksi Pagar Permanen Satwas SDKP Manokwari sebesar Rp131.593.200,00 dengan nomor kontrak 154/PPK/PSDKPSta.8/PL.430/VI/2024 tanggal 28 Juni 2024, jaminan uang muka 18.92.01.070033.06.24 tanggal 28 Desember 2024 dan BAP Nomor 170/PPK/PSDKPSta.8/PL.450/VII/2024 05 Juli 2024
- Pengadaan Jasa Konstruksi Pembangunan Konstruksi Pagar Permanen Satwas SDKP Manokwari sebesar Rp94.319.400,00 dengan nomor kontrak 154/PPK/PSDKPSta.8/PL.430/VI/2024 tanggal 28 Juni 2024, jaminan uang muka 18.92.01.070033.06.24 tanggal 28 Desember 2024 dan BAP II 228.c/PPK/PSDKPSta.8/PL.450/VIII/2024 tanggal 27 Agustus 2024.
- Pengadaan Jasa Konstruksi Pembangunan Konstruksi Pagar Permanen Satwas SDKP Manokwari sebesar Rp245.684.400,00 dengan nomor kontrak 154/PPK/PSDKPSta.8/PL.430/VI/2024 28 Juni 2024, BAP 240/PPK/PSDKPSta.8/PL.450/IX/2024 6

September 2024, BA Prestasi Pekerjaan
237/PPK/PSDKPSta.8/PL.450/IX/2024 5 September
2024

Belanja
Modal
Perencanaan
dan
Pengawasan
Gedung dan
Bangunan
Rp130.036.50
0,00

B.5.4 Belanja Modal Perencanaan dan Pengawasan Gedung dan Bangunan

Realisasi Belanja Modal Perencanaan dan pengawasan gedung dan bangunan TA 2024 dan TA 2023 masing-masing adalah sebesar Rp130.036.500 dan Rp0.

Perbandingan Realisasi Belanja Modal Perencanaan dan Pengawasan Gedung dan Bangunan TA 2024 dan 2023

URAIAN JENIS BELANJA	REALISASI 31 Desember 2024	REALISASI 31 Desember 2023	NAIK (TURUN) %
Belanja Modal Perencanaan dan Pengawasan Gedung dan Bangunan	130.036.500	0	100,00
Jumlah Belanja Kotor	130.036.500	0	100,00
Pengembalian Belanja Modal	-	-	-
Jumlah Belanja	130.036.500	0	100,00

Rincian Realisasi Belanja Modal Perencanaan dan Pengawasan Gedung dan Bangunan adalah:

- Pengadaan Jasa Konsultasi Perencanaan Pembangunan Konstruksi Pos Security dan Rumah Genset sebesar Rp43.512.000,00 dengan nomor kontrak 256/PPK/PSDKPSta.8/PL.430/IX/2024 Tanggal 20 September 2024 dan BAP I 279/PPK/PSDKPSta.8/PL.450/X/2024 Tanggal 15 Oktober 2024;
- Pengadaan Jasa Konsultasi perencanaan teknis pembangunan Pos security dan rumah genset sebesar

Rp10.878.000,00 dengan nomor kontrak 256/PPK/PSDKPSta.8/PL.430/IX/2024 tanggal 20 September 2024, dan BAP nomor 379/PPK/PSDKPSta.8/PL.450/XII/2024 tanggal 16 Desember 2024;

- Pengadaan Jasa Konsultasi pengawasan pembangunan pos security dan rumah genset sebesar Rp34.376.700,00 dengan nomor kontrak 317/PPK/PSDKPSta.8/PL.430/XI/2024 tanggal 11 November 2024 dan BAP 380/PPK/PSDKPSta.8/PL.450/XII/2024 tanggal 17 Desember 2024, BAST 376/PK/PSDKPSta.8/PL.450/XII/2024 tanggal 16 Desember 2024;
- Pengadaan Jasa Konsultasi pengawasan Pembangunan Konstruksi Pagar Permanen Satwas SDKP Manokwari sebesar Rp41.269.800,00 dengan nomor kontrak 155/PPK/PSDKPSta.8/VI/2024 tanggal 28 Juni 24, BAP 241/PPK/PSDKPSta.8/PL.450/IX/2024 tanggal 06 September 2024 DAN BAST 238.a /PPK/PSDKPSta.8/PL.450/IX/2024 tanggal 05 September 2024;

*Belanja
Modal*

B.5.5 Belanja Modal Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan

*Penambahan
Nilai Gedung
dan*

Realisasi belanja modal penambahan nilai gedung dan bangunan pada TA 2024 dan TA 2023 adalah sebesar Rp0.

Bangunan
Rp0

Belanja
Modal Jalan,
Irigasi, dan
jaringan Rp0

B.5.6 Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan pada TA 2024 dan TA 2023 masing-masing adalah sebesar Rp0.

URAIAN JENIS BELANJA	REALISASI 31 Desember 2024	REALISASI 31 Desember 2023
Belanja Modal Jalan dan Jembatan	0	0
Belanja Modal Perencanaan dan Pengawasan Jalan dan Jembatan	0	0
Jumlah Belanja Kotor	0	0
Pengembalian Belanja Modal	0	0
Jumlah Belanja	0	0

Belanja
Modal
Perencanaan
dan
Pengawasan
Jalan, Irigasi
dan Jaringan
Rp0

B.5.7 Belanja Modal Perencanaan dan Pengawasan Jalan dan Jaringan

Realisasi Belanja Modal Perencanaan dan Pengawasan Jalan dan Jaringan TA 2024 dan TA 2023 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0.

Belanja
Modal Aset
Tetap
Lainnya Rp0

B.5.8 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya

Realisasi anggaran Belanja Modal Aset Tetap Lainnya pada TA 2024 adalah sebesar Rp0 sedangkan untuk TA 2023 adalah sebesar Rp0.

Belanja
Bantuan
Sosial Rp0

B.6 Belanja Bantuan Sosial

Pada TA 2024 dan TA 2023 tidak menganggarkan untuk belanja bantuan sosial.

C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

Kas di
Bendahara
Pengeluaran
Rp0

C.1 Kas di Bendahara Pengeluaran

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember TA 2023 adalah sebesar Rp0 yang merupakan kas yang dikuasai, dikelola dan berada di bawah tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari UP/TUP yang belum dipertanggung-jawabkan atau belum disetorkan ke Rekening Kas Negara per tanggal neraca. Uang tunai pada bendahara adalah uang tunai di brankas Rp0 dan uang di rekening bank sebesar Rp0. Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran adalah sebagai berikut:

Keterangan	31 Desember 2024	31 Desember 2023
Uang Tunai	-	
Bank BRI No. Rek 65511525026340002	-	
Kas Pada BPP	-	
Uang Muka	-	
Saldo BP UP	-	
Kwitansi yang belum di SPM kan	-	
Sub Total I	-	
LS Bendahara	-	
Sub Total II	-	
Jumlah (Sub Total I - II)	-	
Kas Bendahara Pengeluaran pada Neraca	-	
Selisih Kas Bendahara Pengeluaran (tidak ada pecahan uang kecil)	-	

Terdapat pengembalian sisa UP Tunai Bulan Desember senilai Rp258.836,00 yang telah disetor pada tanggal 31 Desember 2024 kode billing : 702412312061893, NTB : 241231058 dan NTPN : 058567NA. Sisa TUP bulan Desember senilai Rp173.000,00 telah disetor tanggal 19 Desember 2024 Kode Biling : 702412191971061, kode NTPN: E8D9E1GCAMSVDDNL dan kode NTB : 241219057949.

Kas di

Bendahara

Penerimaan

Rp0

C.2 Kas di Bendahara Penerimaan

Tidak terdapat saldo Kas di Bendahara Penerimaan pada per tanggal 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023.

Kas Lainnya

dan Setara

Kas Rp0

C.3 Kas Lainnya dan Setara Kas

Tidak terdapat saldo Kas Lainnya dan Setara Kas per tanggal tanggal 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023.

Piutang PNB

Piutang Rp0

C.4 Piutang PNB

Saldo Piutang PNB per tanggal tanggal 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp. Rp14.979.504.

Bagian

Lancar

C.5 Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)

Tagihan TP/TGR Rp0 Tidak Terdapat Penyelesaian Ganti Rugi per tanggal 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023

Bagian Lancar TPA Rp0 **C.6 Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran**
Tidak terdapat saldo Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) per tanggal 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023.

Piutang Tak Tertagih – Piutang Lancar Rp0 **C.7 Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Lancar**
Tidak terdapat saldo Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Lancar per tanggal 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023.

Beban Dibayar di Muka Rp0 **C.8 Beban Dibayar di Muka**
Tidak terdapat saldo Beban Dibayar di Muka per tanggal tanggal 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023

Pendapatan yang Masih Harus Diterima Rp0 **C.9 Pendapatan yang Masih Harus Diterima**
Tidak terdapat Pendapatan yang Masih Harus Diterima per tanggal 31 Desember 2024 dan 30 Desember 2023.

Persediaan **C.10 Persediaan**

Rp291.093.588,00 Nilai Persediaan per tanggal 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp291.093.588,00. Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan/atau untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Rincian Persediaan per tanggal 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

Jenis	31 Desember 2024	31 Desember 2023
Barang Konsumsi	94.057.158	85.208.292
Bahan Untuk Pemeliharaan	-	-
Suku Cadang	197.036.430	114.764.897
Pita Cukai, Materai, dan Leges	-	-
Bahan Baku	-	-
Persediaan Lainnya	-	-
Persediaan untuk tujuan berjaga-jaga	-	-
Jumlah	291.093.588	199.973.189

Semua jenis persediaan pada tanggal pelaporan berada dalam kondisi baik. Jenis Persediaan sesuai dengan BA Opname Fisik Persediaan TA 2024 dengan nomor : B. 447/PSDKPSta.8/PL.450/XII/2024 tanggal 31 Desember 2024, dijelaskan sebagai berikut :

1. Barang Konsumsi

Persediaan berupa Barang Konsumsi (kode 117111) senilai Rp94.057.158,00 yang terdiri dari :

- Alat Tulis senilai Rp3.249.250,00
- Tinta Tulis, Tinta Stempel Rp0,00
- Penjepit Kertas Rp12.813.440,00

- d. Penghapus / Korektor Rp216.000,00
- e. Buku Tulis Rp9.984.090,00
- f. Ordner dan Map Rp10.398.104,00
- g. Penggaris Rp18.000,00
- h. Cutter (Alat Tulis Kantor) Rp393.500,00
- i. Alat Perekat Rp2.823.320,00
- j. Staples Rp3.575.000,00
- k. Isi Staples Rp1.522.500,00
- l. Alat Tulis Kantor Lainnya Rp133.882,00
- m. Kertas HVS Rp12.543.600,00
- n. Berbagai Kertas Rp5.283.100,00
- o. Kertas Cover Rp649.350,00
- p. Amplop Rp286.000,00
- q. Tinta/Toner Printer Rp21.933.720,00
- r. USB/Flash Disk Rp4.985.000,00
- s. Mouse Rp880.000,00
- t. Bahan Komputer Lainnya Rp0,00
- u. Batu Baterai Rp547.820,00
- v. Materai Rp520.000,00
- w. Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor lainnya
Rp1.774.482,00.

2. Suku Cadang

Persediaan berupa Bahan baku (kode 117114) senilai Rp197.036.430,00 yang terdiri dari :

- a. Suku cadang alat angkutan apung bermotor senilai Rp197.036.430,00.
- b. Suku cadang alat bengkel tidak bermesin, sebesar Rp0,00.

Saldo Awal per 1 Januari 202 (31 Desember 2023 Audited)	199.973.189
MUTASI TAMBAH	
Penambahan Saldo Awal	
Pembelian	348.651.479
Transfer Masuk	
Hibah Masuk	
Perolehan Lainnya	
Reklasifikasi Masuk	
MUTASI KURANG	
Pemakaian	257.531.080
Tranfer Keluar	
Hibah Keluar	
Barang Usang	
Barang Rusak	
Penghapusan Lainnya	
Pemakaian untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga	
Penyerahan kepada Masyarakat	

Reklasifikasi Keluar	
Koreksi Penyesuaian Persediaan	
Koreksi Tambah	
Koreksi Kurang	
Saldo Akhir	291.093.588

Rincian mutasi transaksi pada modul persediaan adalah sebagai berikut :

TRANSAKSI		NILAI
SALDO AWAL PADA 1 Januari 2024		199.973.189
MUTASI TAMBAH		
M02	Pembelian	348.651.479
TOTAL MUTASI TAMBAH		348.651.479
MUTASI KURANG		
K01	Habis Pakai	257.531.080
TOTAL MUTASI KURANG		257.531.080
SALDO AKHIR PADA 31 Desember 2024		291.093.588

Mutasi Tambah persediaan sebesar Rp.348.651.479 merupakan transaksi pembelian dengan rincian :

- Barang Konsumsi sebesar Rp.97,053,400
- Suku cadang sebesar Rp.251,598,079

Mutasi Kurang Persediaan Sebesar Rp.257.531.080

Berupa transaksi habis pakai sebesar Rp.257.531.080 dengan rincian :

- Barang Konsumsi sebesar Rp. 88.204.534
- Suku cadang sebesar Rp. 169.326.546

<i>Tagihan TP/TGR</i> <i>Rp0</i>	C.11 Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) Tidak Terdapat Penyelesaian Ganti Rugi per 31 Desember 2024
<i>Tagihan Penjualan Angsuran</i> <i>Rp0</i>	C.12 Tagihan Penjualan Angsuran Tidak ada saldo Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023.
<i>Penyisihan Piutang tak Tertagih – Piutang Jangka Panjang</i> <i>Rp0</i>	C.13 Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Jangka Panjang Tidak terdapat saldo Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Jangka Panjang per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023.
<i>Tanah</i> <i>Rp4.529.803.000,00</i>	C.14 Tanah Tanah yang dimiliki Stasiun PSDKP Biak per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp4.529.803.000,00. Mutasi Aset Tetap Tanah adalah sebagai berikut.

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2017	Rp 4.529.803.000
Mutasi Tambah :	
Transfer Masuk	Rp -
Selisih Revaluasi Aset	Rp -
Hibah	
Reklasifikasi	
Pengembangan Melalui KDP	Rp -
Mutasi Kurang :	
Penghapusan	
Saldo per 31 Desember 2023	4.529.803.000
Akumulasi Penyusutan s.d 31 Desember 2024	
Nilai Buku per 31 Desember 2024	Rp 4.529.803.000

Dengan detail Sertifikat sebagai berikut :

1. Sertifikat Hak Pakai atas nama Pemerintah Republik Indonesia Cq. Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia nomor 26.09.12.04.4.00014 tanggal 02 Desember 2015 berlokasi di Biak Papua;
2. Sertifikat Hak Pakai atas nama Pemerintah Republik Indonesia Cq. Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia nomor 26.10.03.14.4.00017 tanggal 12 April 2016 berlokasi di Jayapura Papua;
3. Sertifikat Hak Pakai atas nama Pemerintah Republik Indonesia Cq. Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia nomor 33.01.04.02.4.00044 tanggal 19 Februari 2016 berlokasi di Manokwari Papua Barat.

*Peralatan
dan Mesin
Rp27.546.731.*

C.15 Peralatan dan Mesin

Saldo aset tetap berupa Peralatan dan Mesin per 31

986,00

Desember 2024 adalah sebesar Rp27.546.731.986,00 dengan saldo awal per 1 Januari 2024 adalah Rp27.222.726.187,00 dan mutasi tambah melalui pembelian per 31 Desember 2024 sebesar Rp725.079.134,00 dan mutasi tambah senilai Rp725.079.134,00 Rp dan mutasi kurang melalui reklasifikasi keluar sebesar Rp401.073.335,00.

TRANSAKSI	31 Desember 2023	31 Desember 2023
Saldo Awal	27.222.726.187	25.888.781.077
Mutasi Tambah	725.079.134	2.389.978.321
Pembelian		
Transfer Masuk		
Pengembangan melalui KDP		
Reklasifikasi Masuk		
Mutasi Kurang	(401.073.335)	(1.056.033.211)
Penghapusan		
Transfer Keluar		
Reklasifikasi Keluar		
Koreksi Pencatatan		
Jumlah Aset	27.546.731.986	27.222.726.187

Mutasi Tambah Aset Tetap Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2024 sebesar Rp725.079.134,00 berasal dari pembelian berikut :

URAIAN	REALISASI 31 Desember 2024	REALISASI 31 Desember 2023
Rak Besi		9.990.000,
Loudspeaker	3.885.000,	
Mesin Pemotong Rumput	9.990.000,	
Dive Boots	2.900.000,	
Bouyancy Compensator Device (BCD)	11.807.360,	
Vertikal Blind		28.600.000,
Printer (Peralatan Personal Komputer)	19.160.300,	
Uninterruptible Power Supply (UPS)	5.940.000,	
Camera Digital	20.868.000,	
Scanner (Peralatan Personal Komputer)	8.186.250,	
Tanks (Tabung Selam)	8.400.000,	
Perahu Karet (Alat Angkutan Apung Tak Bermotor Khusus)	157.000.000,	
Snorkel	2.482.500,	
Jam Tangan Penyelam	1.488.800,	
Sofa	17.760.000,	14.710.000,
Teropong		16.700.000,
Clip, Selang & Octopus	4.600.620,	
Kamera Udara	62.624.600,	
Handy Talky (HT)	3.169.000,	
Wet Suit	4.363.500,	
P.C Unit	8.658.000,	
Televisi	33.078.000,	
Lap Top	94.739.400,	
Sepeda Motor	23.532.000,	
Senter Bawah Air	1.158.560,	
Treng Air/Tandon Air	1.290.000,	
Regulator Gauge	3.733.200,	
Telephone Mobile	3.399.000,	
Mesin Pengering Pakaian	5.200.000,	
Tablet PC	29.786.300,	
Camera Under Water	27.618.000,	
Video Conference	3.882.700,	
Mic Video Conference		2.885.200,
Kursi Besi/Metal	17.926.500,	
A.C. Split	5.550.000,	
Kursi Kayu	7.381.500,	
Alat Selam Seet	55.097.724,	
Kursi Dorong	3.052.500,	

Regulator	8.638.820,	
Meja Kerja Kayu	21.978.000,	
Genset	12.543.000,	
Portable Air Conditioner (Alat Pendingin)	5.550.000,	
Masker	3.330.000,	
Fins	3.330.000,	
Jumlah Belanja Kotor	725.079.134	72.885.200
Pengembalian	-	-
Jumlah Belanja	725.079.134	72.885.200

Rincian mutasi Peralatan dan Mesin adalah sebagai berikut :

Mutasi tambah Peralatan dan Mesin tersebut meliputi:

- Pembelian 2 unit Tanks (Tabung Selam) dengan nilai sebesar Rp8.400.000,00 dengan nomor Invoice : 199 dari penyedia Sea Pearl Dive Shop tanggal 19 September 2024;
- Pembelian 2 unit Bouyancy Compensator Device (BCD) dengan nilai sebesar Rp11.807.360,00 dengan nomor Invoice :
- 199 dari penyedia Sea Pearl Dive Shop tanggal 19 September 2024;
- Pembelian 1 unit Perahu Karet (Alat Angkutan Apung Tak Bermotor Khusus) dengan nilai sebesar Rp 157.000.000,00 dengan nomor BAST : 099/PPK/PSDKPSta.8/PL.450/IV/2024 tanggal 23 April 2024;
- Pembelian 1 unit Sepeda Motor dengan nilai sebesar Rp 23.532.000,00 dengan nomor BAST : 163/PPK/PSDKPSta.8/PL.450/VII/2024 tanggal 02 Juli 2024;
- Pembelian 1 unit Senter Bawah Air dengan nilai sebesar Rp1.158.560,,00 dengan nomor Invoice : INV/20241104/MPL/4260294481 tanggal 04 November 2024;
- Pembelian 2 unit Mesin Pemotong Rumput dengan nilai sebesar Rp9.990.000,00 dengan nomor BAST :

- 283/PPK/PSDKPSta.8/PL.450/X/2024 tanggal 18 Oktober 2024;
- Pembelian 1 unit Loudspeaker dengan nilai sebesar Rp 3.885.000,00 dengan nomor BAST : 163/PPK/PSDKPSta.8/PL.450/VII/2024 tanggal 02 Juli 2024;
 - Pembelian 2 unit Televisi dengan nilai sebesar Rp 33.078.000,00 dengan nomor BAST : 283/PPK/PSDKPSta.8/PL.450/X/2024 tanggal 18 Oktober 2024; dan 163/PPK/PSDKPSta.8/PL.450/VII/2024 tanggal 02 Juli 2024;
 - Pembelian 2 unit Sofa dengan nilai sebesar Rp17.760.000,00 dengan nomor BAST : 283/PPK/PSDKPSta.8/PL.450/X/2024 tanggal 18 Oktober 2024;
 - Pembelian 1 unit Treng Air/Tandon Air dengan nilai sebesar Rp1.290.000,00 dengan nomor Kwitansi : 03001/Kw/250263/2024 tanggal 26 November 2024;
 - Pembelian 11 unit Kursi Besi/Metal dengan nilai sebesar Rp17.926.500,00 dengan nomor BAST : 283/PPK/PSDKPSta.8/PL.450/X/2024 tanggal 18 Oktober 2024;
 - 2024;
 - Pembelian 1 unit A.C. Split dengan nilai sebesar Rp 5.550.000,00 dengan nomor BAST : 163/PPK/PSDKPSta.8/PL.450/VII/2024 tanggal 02 Juli 2024;
 - Pembelian 1 unit Mesin Pengering Pakaian dengan nilai sebesar Rp5.200.000,00 dengan nomor KWITANSI : 002/KW/GJ-2024 2024 tanggal 16 Desember 2024;
 - Pembelian 12 unit Meja Kerja Kayu dengan nilai sebesar Rp21.978.000,00 dengan nomor BAST : 283/PPK/PSDKPSta.8/PL.450/X/2024 tanggal 18 Oktober 2024;
 - Terdapat mutasi tambah berupa transaksi reklasifikasi masuk berupa 1 unit Portable Air Conditioner (Alat Pendingin) dengan nilai sebesar Rp 5.550.000,00 dengan nomor BAST : 163/PPK/PSDKPSta.8/PL.450/VII/2024 tanggal 02 Juli 2024;

- Terdapat mutasi tambah berupa transaksi reklasifikasi masuk berupa 1 unit Kursi Kayu sebesar Rp7.381.500,00 dengan nomor surat keterangan koreksi pencatatan modul aset tetap : B.2656/PSDKPSta.8/PL.110/VIII/2024 tanggal 16 Agustus 2024;
- Pembelian 4 unit Uninterruptible Power Supply (UPS) dengan nilai sebesar Rp 5.550.000,00 dengan nomor BAST : 163/PPK/PSDKPSta.8/PL.450/VII/2024 tanggal 02 Juli 2024;
- Pembelian 4 unit Camera Digital dengan nilai sebesar Rp20.868.000,00 dengan nomor BAST : 163/PPK/PSDKPSta.8/PL.450/VII/2024 tanggal 02 Juli 2024;
- Pembelian 3 unit Kamera Udara dengan nilai sebesar Rp 62.624.600,00 dengan nomor BAST : 163/PPK/PSDKPSta.8/PL.450/VII/2024 tanggal 02 Juli 2024; dan Invoice : INV/20240819/MPL/4096674257 tanggal 19 Agustus 2024
- Pembelian 7 unit Handy Talky (HT) dengan nilai sebesar Rp6.166.000,00 dengan nomor BAST : 163/PPK/PSDKPSta.8/PL.450/VII/2024 tanggal 02 Juli 2024, dan Invoice : INV/20241212/MPL/4336751361 tanggal 12 Desember 2024
- Pembelian 1 unit Telephone mobile dengan nilai sebesar Rp3.399.000,00 dengan nomor Invoice : 00559T/250263/2024 tanggal 13 November 2024;
- Pembelian 1 unit Camera Under Water dengan nilai sebesar Rp12.300.000,00 dengan nomor Invoice : INV24/10/IK/10331 tanggal 04 Oktober 2024;
- Terdapat mutasi tambah berupa transaksi reklasifikasi masuk berupa 3 unit Camera Under Water sebesar Rp15.318.000,00 dengan nomor surat keterangan koreksi pencatatan modul aset tetap : B.2656/PSDKPSta.8/PL.110/VIII/2024 tanggal 16 Agustus 2024;
- Pembelian 1 unit Video Conference dengan nilai sebesar Rp3.882.700,00 dengan nomor Invoice :

INV/20240424/MPL/3869746601 tanggal 24 April 2024;

- Pembelian 1 unit Genset dengan nilai sebesar Rp 12.543.000,00 dengan nomor BAST : 163/PPK/PSDKPSta.8/PL.450/VII/2024 tanggal 02 Juli 2024;
- Pembelian 1 unit Kursi Dorong dengan nilai sebesar Rp 3.052.500,00 dengan nomor BAST : 283/PPK/PSDKPSta.8/PL.450/X/2024 tanggal 18 Oktober 2024;
- Pembelian 4 unit Printer (Peralatan Personal Komputer) dengan nilai sebesar Rp19.160.300,00 dengan nomor BAST : 103/PPK/PSDKPSta.8/PL.450/V/2024 tanggal 07 Mei 2024;
- Pembelian 1 unit Scanner (Peralatan Personal Komputer) dengan nilai sebesar Rp8.186.250,00 dengan nomor BAST : 163/PPK/PSDKPSta.8/PL.450/VII/2024 tanggal 02 Juli 2024;
- Pembelian 1 unit P.C Unit dengan nilai sebesar Rp8.658.000,00 dengan nomor BAST : 163/PPK/PSDKPSta.8/PL.450/VII/2024 tanggal 02 Juli 2024;
- Pembelian 8 Unit Lap Top dengan nilai sebesar Rp94.739.400,00 dengan nomor BAST : 163/PPK/PSDKPSta.8/PL.450/VII/2024 tanggal 02 Juli 2024, dan 103/PPK/PSDKPSta.8/PL.450/V/2024 tanggal 07 Mei 2024
- Pembelian 3 unit Tablet PC dengan nilai sebesar Rp29.786.300,00 dengan nomor Invoice : INV/20240417/MPL/3857838334 tanggal 17 April 2024, Kuitansi : 00028/KW/KKP/250263/2024 Tanggal 21 Juni 2024;
- Pembelian 5 unit Dive Boots dengan nilai sebesar Rp4.864.700,00 dengan nomor BAST : 163/PPK/PSDKPSta.8/PL.450/VII/2024 tanggal 02 Juli 2024, Nomor Invoice : 199 dari Sea Pearl Dive Shop tanggal 19 September 2024
- Pembelian 5 unit Snorkel dengan nilai sebesar Rp4.214.100,00 dengan nomor BAST : 163/PPK/PSDKPSta.8/PL.450/VII/2024

tanggal 02 Juli 2024, Nomor Invoice : 199 dari Sea Pearl Dive Shop tanggal 19 September 2024

- Pembelian 1 unit Jam Tangan Penyelam dengan nilai sebesar Rp1.488.800,00 dengan nomor Invoice : INV/20241104/MPL/4260253286 tanggal 04 November 2024
- Pembelian 2 unit Wet Suit dengan nilai sebesar Rp4.363.500,00 dengan nomor Invoice : 199 dari Sea Pearl Dive Shop tanggal 19 September 2024;
- Pembelian 2 unit Clip, Selang & Octopus dengan nilai sebesar Rp4.600.620,00 dengan nomor Invoice : 199 dari Sea Pearl Dive Shop tanggal 19 September 2024;
- Pembelian 2 unit Regulator Gauge dengan nilai sebesar Rp3.733.200,00 dengan nomor Invoice : 199 dari Sea Pearl Dive Shop tanggal 19 September 2024;
- Pembelian 2 unit Regulator dengan nilai sebesar Rp8.638.820,00 dengan nomor Invoice : 199 dari Sea Pearl Dive Shop tanggal 19 September 2024;
- Terdapat transaksi masuk Perolehan lainnya berupa 1 unit Alat Selam Seet sebesar Rp27.548.862,00 dengan nomor surat keterangan koreksi pencatatan modul aset tetap : B.2563/PSDKPSta.8/PL.110/VIII/2024 tanggal 08 Agustus 2024 Koreksi tersebut dilakukan dikarenakan adanya rencana transaksi transfer keluar -transfer masuk berupa 1 unit alat selam seet (1 paket) ke Pangkalan PSDKP Benoa, namun barang yang ditransfer hanya sebagian, sehingga perlu dilakukan koreksi untuk menambah aset dari 1 set alat seam seet menjadi 2 set alat selam seet melalui transaksi Perubahan Nilai Berkurang dan Perolehan lainnya,
- Terdapat transaksi masuk saldo awal berupa 1 unit Alat Selam Seet sebesar Rp27.548.862,00 dengan nomor surat keterangan koreksi pencatatan modul aset tetap : B.2569/PSDKPSta.8/PL.110/VIII/2024 tanggal 08 Agustus 2024, koreksi tersebut dilakukan dikarenakan adanya kesalahan

pencatatan yang seharusnya transaksi Saldo Awal tetapi dilakukan pencatatan transaksi Perolehan Lainnya, sehingga perlu dilakukan penghapusan terhadap NUP 20 Alat Selam Seet melalui Koreksi Pencatatan, kemudian menambahkan 1 set alat selam seet melalui transaksi Saldo Awal pada aplikasi Sakti Modul Aset Tetap.

- Pembelian 3 unit Fins dengan nilai sebesar Rp3.330.000,00 dengan nomor BAST : 163/PPK/PSDKPSta.8/PL.450/VII/2024 tanggal 02 Juli 2024;
- Pembelian 3 unit Masker dengan nilai sebesar Rp3.330.000,00 dengan nomor BAST : 163/PPK/PSDKPSta.8/PL.450/VII/2024 tanggal 02 Juli 2024;

Mutasi Kurang Peralatan dan Mesin tersebut meliputi:

- Terdapat mutasi kurang berupa transaksi penghentian aset dari penggunaan berupa 1 unit Sepeda Motor Merk YAMAHA 3C1 (V-IXION/FZ150) sebesar Rp24.775.000, 00 dengan nomor BA Inventarisasi B.4384/PSDKPSta.8/PL.450/XII/2024 tanggal 23 Desember 2024;
- Transaksi Penghentian Aset Dari Penggunaan berupa 2 unit Global Positioning System sebesar Rp8.250.000,00 dengan nomor BA Inventarisasi: B. 886/PSDKPSta.8/PL.450/III/2024 tanggal 18 Maret 2024;
- Transaksi Penghentian Aset Dari Penggunaan berupa 3 unit Rol Meter sebesar Rp 1.498.755,00 dengan nomor BA Inventarisasi: B. 886/PSDKPSta.8/PL.450/III/2024 tanggal 18 Maret 2024;
- Transaksi Penghentian Aset Dari Penggunaan berupa 1 unit Alat Ukur / Test Klinis Lainnya sebesar Rp 660.000,00 dengan nomor BA Inventarisasi: B. 886/PSDKPSta.8/PL.450/III/2024 tanggal 18 Maret 2024;
- Transaksi Penghentian Aset Dari Penggunaan berupa 3 unit

Mesin Battery Set / Pengisi Accu sebesar Rp 14.911.962,00 dengan nomor BA Inventarisasi: B. 886/PSDKPSta.8/PL.450/III/2024 tanggal 18 Maret 2024;

- Transaksi Penghentian Aset Dari Penggunaan berupa 1 unit Mesin Las Listrik sebesar Rp 5.522.726,00 dengan nomor BA Inventarisasi: B. 886/PSDKPSta.8/PL.450/III/2024 tanggal 18 Maret 2024;
- Transaksi Penghentian Aset Dari Penggunaan berupa 3 unit Senter Bawah Air sebesar Rp1.693.755,00 dengan nomor BA Inventarisasi: B. 886/PSDKPSta.8/PL.450/III/2024 tanggal 18 Maret 2024;
- Transaksi Penghentian Aset Dari Penggunaan berupa 1 unit Kunci Moment sebesar Rp17.684.095,00 dengan nomor BA Inventarisasi: B. 886/PSDKPSta.8/PL.450/III/2024 tanggal 18 Maret 2024;
- Transaksi Penghentian Aset Dari Penggunaan berupa 1 unit Kompor Listrik (Alat Dapur) sebesar Rp 8.525.000,00 dengan nomor BA Inventarisasi : B. 886/PSDKPSta.8/PL.450/III/2024 tanggal 18 Maret 2024;
- Transaksi Penghentian Aset Dari Penggunaan berupa 7 unit Kursi Besi/Metal sebesar Rp12.421.700,00 dengan nomor BA Inventarisasi : B. 886/PSDKPSta.8/PL.450/III/2024 tanggal 18 Maret 2024;
- Transaksi Penghentian Aset Dari Penggunaan berupa 4 unit A.C. Split sebesar Rp19.949.330,00 dengan nomor BA Inventarisasi : B. 886/PSDKPSta.8/PL.450/III/2024 tanggal 18 Maret 2024;
- Transaksi Penghentian Aset Dari Penggunaan berupa 2 unit Mesin Pengering pakaian sebesar Rp 12.466.000,00 dengan nomor BA Inventarisasi : B. 886/PSDKPSta.8/PL.450/III/2024 tanggal 18 Maret 2024;
- Transaksi Penghentian Aset Dari Penggunaan berupa 1 unit

Dispenser sebesar Rp1.831.500,00 dengan nomor BA Inventarisasi : B. 886/PSDKPSta.8/PL.450/III/2024 tanggal 18 Maret 2024;

- Transaksi Penghentian Aset Dari Penggunaan berupa 1 unit Meja kerja kayu sebesar Rp2.750.000,00 dengan nomor BA Inventarisasi : B. 886/PSDKPSta.8/PL.450/III/2024 tanggal 18 Maret 2024;
- Transaksi Penghentian Aset Dari Penggunaan berupa 2 unit Alat Pengaman / Sinyal sebesar Rp3.062.000,00 dengan nomor BA Inventarisasi : B. 886/PSDKPSta.8/PL.450/III/2024 tanggal 18 Maret 2024;
- Transaksi Penghentian Aset Dari Penggunaan berupa 2 unit Teropong/Keker NUP 5 dan 7 sebesar Rp7.381.000,00 dengan nomor BA Inventarisasi : B. 886/PSDKPSta.8/PL.450/ III/2024 tanggal 18 Maret 2024;
- Terdapat mutasi kurang berupa transaksi reklasifikasi keluar berupa 1 unit Kamera Udara NUP 3 sebesar Rp23.532.000,00 dengan nomor surat keterangan koreksi pencatatan modul aset tetap : B. 2656/PSDKPSta.8/PL.110/ VII/2024 tanggal 16Agustus 2024;
- Transaksi Penghentian Aset Dari Penggunaan berupa 4 unit Camera Under Water NUP 1-4 sebesar Rp 33.312.172,00 dengan nomor BA Inventarisasi : B. 886/PSDKPSta.8/PL.450/ III/2024 tanggal 18 Maret 2024;
- Transaksi Penghentian Aset Dari Penggunaan berupa 5 unit Digital Video Effect NUP 1-5 sebesar Rp17.930.000,00 dengan nomor BA Inventarisasi : B. 886/PSDKPSta.8/PL.450/ III/2024 tanggal 18 Maret 2024;
- Transaksi Penghentian Aset Dari Penggunaan berupa 1 unit Senter (Alat Kedokteran Umum) NUP 1 sebesar Rp1.800.000,00 dengan nomor BA Inventarisasi : B. 886/PSDKPSta.8/PL.450/ III/2024 tanggal 18 Maret 2024;
- Transaksi Penghentian Aset Dari Penggunaan berupa 3 unit Angle Measuring Tools (Jangka Sorong) NUP 1-3 sebesar

Rp1.693.755,00 dengan nomor BA Inventarisasi : B.886/PSDKPSta.8/PL.450/ III/2024 tanggal 18 Maret 2024;

- Transaksi penghentian aset dari penggunaan berupa 1 unit Note Book NUP 2 sebesar Rp15.000.000,00 dengan nomor BA Inventarisasi : B.886/PSDKPSta.8/PL.450/ III/2024 tanggal 18 Maret 2024;
- Transaksi penghentian aset dari penggunaan berupa 1 unit P.C Unit NUP 12 sebesar Rp10.000.000,00 dengan nomor BA Inventarisasi : B.886/PSDKPSta.8/PL.450/ III/2024 tanggal 18 Maret 2024;
- Transaksi penghentian aset dari penggunaan berupa 2 unit Lap Top NUP 14,15 sebesar Rp19.949.804,00 dengan nomor BA Inventarisasi : B.886/PSDKPSta.8/PL.450/ III/2024 tanggal 18 Maret 2024;
- Transaksi Transfer Keluar berupa 1 unit Tablet PC NUP 9 sebesar Rp6.499.000,00 dengan nomor Surat keterangan koreksi pencatatan modul aset tetap : B.3042/PSDKPSta.8/PL.110/VIII/2024 tanggal 12 Agustus 2024;
- Transaksi penghentian aset dari penggunaan berupa 16 unit Life Jacket NUP 1-16 sebesar Rp10.518.775,00 dengan nomor BA Inventarisasi : B.886/PSDKPSta.8/PL.450/ III/2024 tanggal 18 Maret 2024;
- Terdapat transaksi Keluar berupa Koreksi Nilai Berkurang 1 unit Alat Selam Seet sebesar Rp27.548.862,00 dengan nomor surat keterangan koreksi pencatatan modul aset tetap : B.2563/PSDKPSta.8/PL.110/VIII/2024 tanggal 08 Agustus 2024
Koreksi tersebut dilakukan dikarenakan adanya rencana transaksi transfer keluar -transfer masuk berupa 1 unit alat selam seet (1 paket) ke Pangkalan PSDKP Benoa,namun barang yang ditransfer hanya sebagian, sehingga perlu dilakukan koreksi untuk menambah aset dari 1 set alat selam seet menjadi 2 set alat selam seet melalui transaksi Perubahan Nilai Berkurang dan Perolehan lainnya,

- Terdapat transaksi keluar berupa koreksi pencatatan 1 unit Alat Selam Seet sebesar Rp27.548.862,00 dengan nomor surat keterangan koreksi pencatatan modul aset tetap : B.2569/PSDKPSta.8/PL.110/VIII/2024 tanggal 08 Agustus 2024, koreksi tersebut dilakukan dikarenakan adanya kesalahan pencatatan yang seharusnya transaksi Saldo Awal tetapi dilakukan pencatatan transaksi Perolehan Lainnya, sehingga perlu dilakukan penghapusan terhadap NUP 20 Alat Selam Seet melalui Koreksi Pencatatan, kemudian menambahkan 1 set alat selam seet melalui transaksi Saldo Awal pada aplikasi Sakti Modul Aset Tetap.
- Transaksi penghentian aset dari penggunaan berupa 3 unit Jet Pump NUP 1-3 sebesar Rp7.731.817,00 dengan nomor BA inventarisasi : B.886/PSDKPSta.8/PL.450/ III/2024 tanggal 18 Maret 2024;
- Transaksi penghentian aset dari penggunaan berupa 1 unit Treadmill NUP 1 sebesar Rp9.500.000,00 dengan nomor BA inventarisasi : B.886/PSDKPSta.8/PL.450/ III/2024 tanggal 18 Maret 2024;
- Transaksi penghentian aset dari penggunaan berupa 1 unit Treadmill NUP 1 sebesar Rp9.500.000,00 dengan nomor BA inventarisasi : B.886/PSDKPSta.8/PL.450/ III/2024 tanggal 18 Maret 2024;

Gedung dan Bangunan
Rp7.294.176.828,00

C.16 Gedung dan Bangunan

- Nilai Gedung dan Bangunan per tanggal 31 Desember Rp7.294.176.828,00 terdiri dari saldo awal sejumlah 7 nilai sebesar Rp6.303.821.055,00 mutasi tambah sejumlah dengan nilai sebesar Rp7.294.176.828,00, dan mutasi kurang sejumlah 0 unit dengan nilai sebesar Rp0,00.

Penjelasan mutasi tambah gedung dan bangunan per

Uraian Jenis Transaksi	Mutasi tambah	Mutasi kurang	Total (Rp)
Penyelesaian Pembangun dengan KDP	7.294.176.828	-	7.294.176.828

aan Jasa Konsultasi Perencanaan Pembangunan Kantor Security dan Rumah Genset sebesar Rp43.512.000 nomor kontrak 256/PPK/PSDKPSta.8/PL.430/IX/2024 September 2024 dan BAP I DPKPSta.8/PL.450/X/2024 Tanggal 15 Oktober 2024;

- Pengadaan Jasa Konstruksi uang muka 30% Pekerjaan Konstruksi Pos Security dan Rumah Genset sebesar Rp99.038.700,00 dengan nomor kontrak 315/PPK/PSDKPSta.8/PL.430/XI/2024 tanggal 15 November 2024 dan BAP nomor 334/PPK/PSDKPSta.8/PL.430/XI/2024 tanggal 28 November 2024 dan Jaminan Uang Muka

18.92.01.070322.tanggal 11.24 26 November 2024;

- Pengadaan Jasa Konsultasi perencanaan teknis pemb security dan rumah genset sebesar Rp10.878.000 nomor kontrak 256/PPK/PSDKPSta.8/PL.430/IX/2024 September 2024, dan BAP 379/PPK/PSDKPSta.8/PL.450/XII/2024 tanggal 10 2024;
- Pengadaan Jasa Konsultasi pengawasan pemb security dan rumah genset sebesar Rp34.376.700 nomor kontrak 317/PPK/PSDKPSta.8/PL.430/XI/2024 November 2024 dan BAP 380/PPK/PSDKPSta.8/PL.4 tanggal 17 Desember 2024, BAST 371/PPK/PSDKPSta.8/PL.450/XII/2024 tanggal 16 Desemb
- Pengadaan Jasa Konstruksi Pembangunan Pos P Konstruksi Pos Security dan Rumah Genset sebesar Rp237.296.300,00 dengan nomor kontrak 315/PPK/PSDKPSta.8/PL.430/XI/2024 tanggal 10 2024, BAP 372/PPK/PSDKPSta.8/PL.450/XII/2024 Desember 2024 BAST 371/PPK/PSDKPSta.8/PL.4 tanggal 16 Desember 2024;
- Pengadaan Jasa Konstruksi uang muka 30% P Konstruksi Pagar Permanen Satwas SDKP Manok sebesar Rp131.593.200,00 dengan nomor kontrak 154/PPK/PSDKPSta.8/PL.430/VI/2024 tanggal 28 jaminan uang muka 18.92.01.070033.06.24 tanggal 2024 dan BAP Nomor 170/PPK/PSDKPSta.8/PL.450, Juli 2024

- Pengadaan Jasa Konstruksi Pembangunan Konstruksi Permanen Satwas SDKP Manokwari sebesar Rp9 dengan nomor kontrak 154/PPK/PSDKPSta.8/PL. tanggal 28 Juni 2024, jaminan uang muka 18.92.01.0 tanggal 28 Desember 2024 dan 228.c/PPK/PSDKPSta.8/PL.450/VIII/2024 tanggal 2024.
- Pengadaan Jasa Konsultasi pengawasan Pembangunan Pagar Permanen Satwas SDKP Manokwari sebesar Rp41.269.800,00 dengan nomor kontrak 155/PPK/PSDKPSta.8/VI/2024 tanggal 28 Juni 2024, BAP 241/PPK/PSDKPSta.8/PL.450/IX/2024 tanggal 06 September 2024 DAN BAST 238.a /PPK/PSDKPSta.8/PL.450/IX/2024 tanggal 05 September 2024;
- Pengadaan Jasa Konstruksi Pembangunan Konstruksi Permanen Satwas SDKP Manokwari sebesar Rp24 dengan nomor kontrak 154/PPK/PSDKPSta.8/PL.430 tanggal 28 Juni 2024, BAP 240/PPK/PSDKPSta.8/PL.450/IX/2024 tanggal 06 September 2024, BAST 237/PPK/PSDKPSta.8/PL.450/IX/2024 tanggal 05 September 2024;

Jalan, Jaring **C.17 Jalan, Irigasi, dan Jaringan**

an dan
Irigasi
Rp855.830.143
,00

Saldo Jalan, Irigasi, dan Jaringan per 30 September 2024 adalah Rp855.830.143,00 yang terdiri atas Jalan lainnya Rp349.959.593,00, Bangunan Talud penahan sebesar Rp195.000.000,00, Bangunan Penampung Air Baku sebesar Rp295.870.550,00 dan Jaringan Listrik Lainnya Rp15.000.000,00.

Uraian Jenis Transaksi	Realisasi 31 Desember 2023	Realisasi 31 Desember 2022	Naik (Turun) Rp
Jalan, Irigasi dan Jaringan	855.830.143	855.830.143	-
Jumlah	855.830.143	855.830.143	-

Aset Tetap
Lainnya
Rp0

C.18 Aset Tetap Lainnya

Aset Tetap Lainnya merupakan aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan dalam tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan. Saldo Aset Tetap Lainnya per tanggal 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing dengan nominal Rp0 dan Rp0.

Konstruksi
Dalam
Pengerjaan
Rp0

C.19 Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP)

Konstruksi Dalam Pengerjaan per 31 Desember TA 2024 Rp0,00 per 31 Desember TA 2023 yaitu sebesar Rp52.387.273,00. Konstruksi Dalam Pengerjaan pada 31 Desember Tahun 2024 telah menjadi Aset karena telah dilakukan pembangunan pada Pagar Kantor Satwas SDKP Manokwari. Konstruksi Dalam Pengerjaan adalah aset-aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan. Konstruksi

Dalam Pengerjaan mencakup peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, serta aset tetap lainnya yang proses perolehannya dan/atau pembangunannya membutuhkan suatu periode waktu tertentu dan belum selesai pada saat akhir tahun anggaran. Rincian Konstruksi Dalam Pengerjaan adalah sebagai berikut :

*Realisasi Perbandingan Bangunan Dalam Pengerjaan
TA 2024 dan 2023*

URAIAN	REALISASI 31 Desember 2024	REALISASI 31 Desember 2023
Saldo Konstruksi Dalam Pengerjaan Awal Tahun	-	52.387.273
Pekerjaan Konstruksi Dalam Pengerjaan	-	-
Pengembangan KDP	-	-
Perolehan/Penambahan KDP	-	-
Penghapusan / Penghentian KDP	-	-
Jumlah Belanja Kotor	-	52.387.273
Penyelesaian Pembangunan KDP		
Jumlah Belanja	-	52.387.273

Saldo Konstruksi Dalam Pengerjaan pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Per 31 Desember 2024 adalah sebanyak 0 KDP sebesar Rp0,00, jumlah tersebut terdiri atas saldo awal sebanyak 1 KDP dengan nilai sebesar Rp52.387.273,00 mutasi tambah dengan nilai sebesar Rp937,968,500,00 dan mutasi kurang dengan nilai sebesar Rp990,355,773,00.

Penjelasan mutasi tambah KDP periode Per 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut.

Terdapat Mutasi Tambah Pengembangan KDP yang

diperoleh dari Pengadaan Jasa Konsultasi Perencanaan Pembangunan Konstruksi Pos Security dan Rumah Genset sebesar Rp43.512.000,00 dengan nomor kontrak 256/PPK/PSDKPSta.8/PL.430/IX/2024 Tanggal 20 September 2024 dan BAP I 279/PPK/PSDKPSta.8/PL.450/X/2024 Tanggal 15 Oktober 2024;

- Terdapat Mutasi Tambah Pengembangan KDP yang diperoleh dari Pengadaan Jasa Konstruksi uang muka 30% Pembangunan Konstruksi Pos Security dan Rumah Genset sebesar Rp99.038.700,00 dengan nomor kontrak 315/PPK/PSDKPSta.8/PL.430/XI/2024 tanggal 11 November 2024 dan BAP nomor 334/PPK/PSDKPSta.8/PL.450/XI/2024 tanggal 28 November 2024
- Terdapat Mutasi Tambah Pengembangan KDP yang diperoleh dari Pengadaan Jasa Konsultasi perencanaan teknis pembangunan Pos security dan rumah genset sebesar Rp10.878.000,00 dengan nomor kontrak 256/PPK/PSDKPSta.8/PL.430/IX/2024 tanggal 20 September 2024, dan BAP nomor 379/PPK/PSDKPSta.8/PL.450/XII/2024 tanggal 16 Desember 2024;
- Terdapat Mutasi Tambah Pengembangan KDP yang diperoleh dari Pengadaan Jasa Konsultasi pengawasan pembangunan pos security dan rumah genset sebesar Rp34.376.700,00 dengan nomor kontrak 317/PPK/PSDKPSta.8/PL.430/XI/2024 tanggal 11 November 2024 dan BAP

380/PPK/PSDKPSta.8/PL.450/XII/2024 tanggal 17
Desember 2024, BAST 376/P
PK/PSDKPSta.8/PL.450/XII/2024 tanggal 16
Desember 2024;

Terdapat Mutasi Tambah Pengembangan KDP yang
diperoleh dari Pengadaan Jasa Konstruksi
Pembangunan Pos Pembangunan Konstruksi Pos
Security dan Rumah Genset sebesar
Rp237.296.300,00 dengan nomor kontrak
315/PPK/PSDKPSta.8/PL.430/XI/2024 tanggal 11
November 2024, BAP
372/PPK/PSDKPSta.8/PL.450/XII/2024 tanggal 16
Desember 2024 BAST
371/PPK/PSDKPSta.8/PL.450/XII/2024 tanggal 16
Desember 2024;

- Terdapat Mutasi Tambah Pengembangan KDP yang
diperoleh dari Pengadaan Jasa Konstruksi uang muka
30% Pembangunan Konstruksi Pagar Permanen
Satwas SDKP Manokwari sebesar Rp131.593.200,00
dengan nomor kontrak
154/PPK/PSDKPSta.8/PL.430/VI/2024 tanggal 28
Juni 2024, dan BAP Nomor
170/PPK/PSDKPSta.8/PL.450/VII/2024 05 Juli 2024
- Terdapat Mutasi Tambah Pengembangan KDP yang
diperoleh dari Pengadaan Jasa Konstruksi
Pembangunan Konstruksi Pagar Permanen Satwas
SDKP Manokwari sebesar Rp94.319.400,00 dengan
nomor kontrak
154/PPK/PSDKPSta.8/PL.430/VI/2024 tanggal 28

Juni 2024, dan BAP II 228.c/PPK/PSDKPSta.8/PL.450/VIII/2024 tanggal 27 Agustus 2024.

- Terdapat Mutasi Tambah Pengembangan KDP yang diperoleh dari Pengadaan Jasa Konsultasi pengawasan Pembangunan Konstruksi Pagar Permanen Satwas SDKP Manokwari sebesar Rp41.269.800,00 dengan nomor kontrak 155/PPK/PSDKPSta.8/VI/2024 tanggal 28 Juni 24 BAP 241/PPK/PSDKPSta.8/PL.450/IX/2024 tanggal 06 September 2024 DAN BAST 238.a /PPK/PSDKPSta.8/PL.450/IX/2024 tanggal 05 September 2024;
- Terdapat Mutasi Tambah Pengembangan KDP yang diperoleh dari Pengadaan Jasa Konstruksi Pembangunan Konstruksi Pagar Permanen Satwas SDKP Manokwari sebesar Rp245.684.400,00 dengan nomor kontrak 154/PPK/PSDKPSta.8/PL.430/VI/2024 28 Juni 2024, BAP 240/PPK/PSDKPSta.8/PL.450/IX/2024 6 September 2024, BA Prestasi Pekerjaan 237/PPK/PSDKPSta.8/PL.450/IX/2024 5 September 2024

*Akumulasi
Penyusutan
Aset Tetap
Rp(26.360.21*

C.20 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2024 Rp(26.360.212.250,00), sedangkan saldo akumulasi

2.250,00)

penyusutan aset tetap per tanggal 31 Desember 2023 adalah Rp(24.015.119.156,00 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang disusutkan selama masa manfaat aset yang bersangkutan selain untuk Tanah dan Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP) :

No	Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
1	Peralatan dan Mesin	27.546.731.986	(25.439.530.047)	2.107.201.939
2	Gedung dan Bangunan	7.294.176.828	(723.913.952)	6.570.262.876
3	Jalan, Irigasi dan Jaringan	855.830.143	(196.768.251)	659.061.892
4	Tanah	4.529.803.000		
4	Aset Tetap Lainnya	0	-	0
Akumulasi Penyusutan		40.226.541.957	(26.360.212.250)	13.866.329.707

Aset Tak
Berwujud
Rp0

C.21 Aset Tak Berwujud

Saldo Aset Tak Berwujud (ATB) per 31 Desember 2024 adalah Rp0. ATB merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan dimiliki, tetapi tidak mempunyai wujud fisik.

Aset Lain-
Lain Rp0

C.22 Aset Lain-Lain

Saldo Aset Lain-lain per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp0. Aset lain-lain merupakan aset tetap yang tidak digunakan dikarenakan kondisi rusak berat dan tidak dapat digunakan.

Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya **C.23 Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya**

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya 31 Desember 2024 dan tanggal 31 Desember 2023 masing-masing sebesar Rp0

Uang Muka dari KPPN **C.24 Uang Muka dari KPPN**

Saldo Uang Muka dari KPPN per 31 Desember 2024 sebesar Rp0. Uang Muka dari KPPN merupakan Uang Persediaan (UP) atau Tambahan Uang Persediaan (TUP) yang diberikan KPPN sebagai uang muka kerjaan masih berada pada atau dikuasai oleh Bendahara Pengeluaran pada tanggal pelaporan.

Utang kepada Pihak Ketiga **C.25 Utang kepada Pihak Ketiga**

Terdapat Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2024 dan tanggal 31 Desember 2023 masing-masing adalah Rp4.007.548,00 dan Rp18.149.947,00 . Utang kepada pihak ketiga berasal dari tagihan pembayaran langganan air PDAM Bulan Desember 2023 sebesar Rp147.359,00 telah dibayar pada tanggal 13 Januari 2025, tagihan pembayaran telepon dan internet Stasiun PSDKP Biak Rp3.860.189,00 telah dibayar pada tanggal 13 Januari 2025.

Rincian Utang Pihak Ketiga

NO	NAMA	TAGIHAN
1	Pembayaran Telp Stasiun PSDKP Biak	27.750
2	Pembayaran Internet Stasiun PSDKP Biak	963.840
	Pembayaran Internet Stawas SDKP Nabire	490.090
3	Pembayaran Internet Stawas SDKP Manokwari	714.149
4	Pembayaran Internet Stawas SDKP Jayapura	663.250
5	Pembayaran Internet Kp.Hiu Macan 04	1.001.500
6	Pembayaran Air Stasiun PSDKP Biak Bulan Desember 2024	147.359
		4.007.938

Pendapatan yang Ditangguhkan Rp0

C.26 Pendapatan yang Ditangguhkan

Tidak terdapat Pendapatan yang ditangguhkan per 31 Desember 2024 dan tanggal 31 Desember 2023.

Pendapatan Diterima di Muka Rp0

C.27 Pendapatan Diterima di Muka

Tidak terdapat Pendapatan Diterima di Muka per per 31 Desember 2024 dan tanggal 31 Desember 2023.

Beban yang Masih Harus Dibayar Rp0

C.28 Beban yang Masih Harus Dibayar

Tidak terdapat Beban yang Masih Harus Dibayar per 31 Desember 2024 dan tanggal 31 Desember 2023.

Ekuitas

C.29 Ekuitas

Rp14.153.415.747,00 Ekuitas pertanggal 31 Desember 2024 sebesar Rp14.153.415.747,00. Ekuitas adalah kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

D. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

Pendapatan PNBP Lainnya Rp3.162.536,00 **D.1 Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya**
Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp3.162.536,00. Pendapatan tersebut berasal dari Pendapatan Negara Bukan Pajak berupa pembayaran sewa rumah negara selama bulan Januari s/d Desember 2024 dengan rincian sebagai berikut :

- A. Pendapatan sewa bangunan Negara pada Bulan Januari 2024 sebesar **Rp790.634,00** sesuai dengan dokumen SPM Nomor 001A;
- B. Pendapatan sewa bangunan Negara pada Bulan Februari 2024 sebesar **Rp790.634,00** sesuai dengan dokumen SPM Nomor 005A;
- C. Pendapatan sewa bangunan Negara pada Bulan Maret 2024 sebesar **Rp790.634,00** sesuai dengan dokumen SPM Nomor 0102A;
- D. Pendapatan sewa bangunan Negara pada Bulan April 2024 sebesar **Rp790.634,00** sesuai dengan dokumen SPM Nomor 075T.

Rincian Pendapatan TA 2024 dan 2023

URAIAN	31-Dec-24	31-Dec-23
PENDAPATAN		
Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya	3.162.536	9.487.608
JUMLAH PENDAPATAN	3.162.536	9.487.608

Beban

Pegawai

Rp7.030.016.314,00

D.2 Beban Pegawai

Jumlah Beban Pegawai 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp7.030.016.314,00 sedangkan Jumlah Beban Pegawai 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp5.839.605.960,00 Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal. Rincian Gaji Pegawai adalah sebagai berikut :

URAIAN	REALISASI 31 DESEMBER 2024	REALISASI 31 DESEMBER 2023
Beban Gaji Pokok PNS	1.983.079.300	1.903.516.980
Beban Pembulatan Gaji PNS	28.955	34.187
Beban Tunj. Suami/Istri PNS	158.474.330	152.645.898
Beban Tunj. Anak PNS	53.806.928	50.016.916
Beban Tunj. Struktural PNS	12.600.000	12.600.000
Beban Tunj. Fungsional PNS	33.410.000	36.210.000
Beban Tunj. PPh PNS	10.058.697	497.650
Beban Tunj. Beras PNS	136.584.120	141.870.780
Beban Tunj. Umum PNS	75.065.000	90.660.000
Beban Uang Makan PNS	177.665.000	200.443.000
Beban Uang Lembur	97.398.000	170.808.000
Beban Tunjangan Khusus Papua PNS	200.075.000	227.485.000
Beban Tunjangan Khusus/Kegiatan PNS	2.582.361.610	2.371.885.206
Beban Gaji Pokok PPPK	520.166.000	151.959.000
Beban Pembulatan Gaji PPPK	10.399	3.605
Beban Tunj. Suami/Istri PPPK	20.985.980	5.452.900
Beban Tunj. Anak PPPK	4.094.248	1.154.670
Beban Tunj. Fungsional PPPK	45.240.000	14.100.000
Beban Tunj. Beras PPPK	23.101.980	6.879.900
Beban Uang Makan PPPK	55.279.000	26.268.000
Beban Uang Lembur	78.329.000	32.675.000
Beban Tunjangan Khusus Papua PPPK	56.400.000	21.000.000
Beban Tunjangan Khusus/Kegiatan PPPK	705.802.767	221.439.268
Jumlah Beban Bersih	7.030.016.314	5.839.605.960

Terdapat selisih beban pegawai antar LO dan LRA senilai Rp7.587.000 yang berasal dari uang makan PNS Stasiun PSDKP Biak Periode 15 – 31 Desember 2023 sebesar

Rp5.658.000,00 untuk 26 pegawai telah dibayarkan tanggal 12 Januari 2024 SPM Nomor 00006A, Uang makan PPPK Stasiun PSDKP Biak Periode 15 – 31 Desember 2023 sebesar Rp1.929.000,00 untuk 11 pegawai telah dibayarkan tanggal 12 Januari 2024 SPM Nomor 00008A.

Beban

D.3 Beban Persediaan

Persediaan

Rp88.204.534,00

Jumlah Beban Persediaan per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp88.204.534,00 dan Rp97.102.277,00. Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan. Rincian Beban Persediaan adalah sebagai berikut :

URAIAN JENIS BEBAN	31 Des 2022	31 Des 2022	NAIK (TURUN) %
Beban Persediaan Konsumsi	88.204.534	97.102.277	(9,16)
Beban Persediaan Pita Cukai, Materai dan Leges	0	0	-
Beban Persediaan bahan untuk pemeliharaan	0	0	-
Beban Persediaan Bahan Baku	0	0	-
Bahan Persediaan Suku Cadang	0	0	-
Beban Penyesuaian Nilai Aset Persediaan	0	0	-
Jumlah Beban Persediaan	88.204.534	97.102.277	90,84

Beban

D.4 Beban Barang dan Jasa

Barang dan
Jasa

Jumlah Beban Barang dan Jasa per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp8.651.301.811,00 dan Jumlah Beban

Rp8.651.301.811,00 Barang dan Jasa per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp12.685.347.735,00. Beban Barang dan Jasa terdiri dari beban barang dan jasa berupa konsumsi atas barang dan/atau jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas serta beban lain-lain berupa beban yang timbul karena penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap.

URAIAN JENIS BEBAN	31-Dec-24	31-Dec-23
Beban Keperluan Perkantoran	857.463.947	1.481.067.018
Beban Penambah Daya Tahan Tubuh	199.846.447	144.281.908
Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	26.659.690	10.155.964
Beban Honor Operasional Satuan Kerja	86.568.000	181.350.000
Beban Barang Operasional Lainnya	267.984.438	354.445.542
Beban Bahan	5.318.270.867	9.208.042.658
Beban Honor Output Kegiatan	16.150.000	5.330.000
Beban Barang Non Operasional Lainnya	352.630.500	419.300.300
Beban Langganan Listrik	213.288.155	187.545.079
Beban Langganan Telepon	60.693.548	147.551.532
Beban Langganan Air	37.539.769	35.464.831
Beban Jasa Konsultan		99.511.500
Beban Sewa	210.721.050	253.134.653
Beban Jasa Profesi	1.700.000	4.000.000
Beban Jasa Lainnya	995.092.100	154.166.750
Beban Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19	0	0
Beban Aset Ekstrakomtabel Peralatan dan Mesin	6.693.300	0
Jumlah LO	8.651.301.811	12.685.347.735
Pengembalian Beban Bahan	-	-
Pengembalian Beban Barang Non Operasional Lainnya	-	-
Jumlah Beban Barang dan Jasa	8.651.301.811	12.685.347.735

Terdapat selisih antara LO dengan LRA senilai Rp6.555.399,00 yang berasal dari tagihan pembayaran telepon dan internet Stasiun PSDKP Biak Rp10.277.639,00 telah dibayar pada tanggal 11 Januari 2024 dan tagihan pembayaran langganan air PDAM Bulan Desember 2023

sebesar Rp285.308,00 telah dibayar pada tanggal 11 Januari 2024 dikurangi transaksi akrual yang atas pembayaran tagihan air PDAM Bulan Desember 2024 sebesar Rp147.359,00 dan tagihan telepon dan internet bulan Desember 2024 sebesar Rp3.860.189,00 yang telah dibayarkan pada tanggal 13 Januari 2025 dan telah dilakukan jurnal penyesuaian terhadap beban tersebut.

Beban

D.5 Beban Pemeliharaan

Pemeliharaan

n

Rp3.347.751.

659,00

Beban Pemeliharaan per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing adalah sebesar Rp3.347.751.659,00 dan Rp1.715.075.010. Beban Pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal.

Rincian Beban Pemeliharaan Tahun 2024 dan TA 2023

URAIAN JENIS BEBAN	31-Dec-23	31-Dec-23	NAIK (TURUN) %
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	206.278.068	392.251.155	(47,41)
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	2.972.147.045	1.097.801.023	170,74
Beban Persediaan Suku Cadang	169.326.546	225.022.832	(24,75)
Jumlah	3.347.751.659	1.715.075.010	95,20

Beban

D.6 Beban Perjalanan Dinas

Perjalanan

Dinas

Rp2.856.278.

752,00

Beban Perjalanan Dinas per 31 Desember 2024 dan 30 Desember 2023 masing-masing adalah sebesar Rp2.856.278.752,00 dan Rp2.186.277.835,00. Beban tersebut merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan

dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan. Rincian Beban Perjalanan Dinas untuk Tahun 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut :

URAIAN JENIS BEBAN	31-Dec-24	31-Dec-23	NAIK (TURUN) %
Beban Perjalanan Biasa	2.154.880.023	1.766.296.578	22,00
Beban Perjalanan Tetap		0	0,00
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	55.940.000	13.350.000	319,03
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	36.000.000	42.100.000	0,00
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	609.458.729	364.531.257	67,19
Jumlah	2.856.278.752	2.186.277.835	30,65

*Beban Barang
untuk
Diserahkan
kepada
Masyarakat
Rp0*

D.7 Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat

Tidak ada Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023.

*Beban
Bantuan
Sosial Rp0*

D.8 Beban Bantuan Sosial

Tidak ada Beban Bantuan Sosial per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023.

*Beban
Penyusutan
dan
Amortisasi*

D.9 Beban Penyusutan dan Amortisasi

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp2.625.139.188,00 dan

Rp2.625.139.188,00 Rp2.172.977.696,00. Beban Penyusutan merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud.

URAIAN BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI	31-Dec-23	31-Dec-23	NAIK/TURUN %
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	2.442.486.548	2.000.228.614	22,11
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	135.979.982	126.076.424	7,86
Beban Penyusutan Jalan, Jembatan dan Irigasi	46.672.658	46.292.724	0,82
Beban Penyusutan Jaringan		379.934	(100,00)
Beban Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasional Pemerintah	-	-	-
Jumlah Penyusutan	2.625.139.188	2.172.977.696	20,81
			-
Beban Amortisasi Aset Tak Berwujud	-	-	-
Beban Penyusutan aset lain-lain	-	-	-
Jumlah Amortisasi	-	-	-
Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi	2.625.139.188	2.172.977.696	20,81

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih
Rp(0) Tidak terdapat beban penyisihan Piutang tak tertagihkan per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023.

Beban Transfer
Rp0 Tidak ada Beban Transfer 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023.

Surplus dari **D.12 Kegiatan Non Operasional**

*Kegiatan Non
Operasional
Rp(2.099.317
, 00)*

Pos Surplus dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya *tidak* rutin dan bukan merupakan tugas pokok Dan fungsi entitas. Surplus dari Kegiatan Non Operasional per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp(2.099.317,00) dan Rp4.770.930,00.

URAIAN	31-Dec-22	31-Dec-22
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		
Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain	0	0
Penerimaan Kembali Belanja Modal TA Yang lalu	0	0
Penerimaan Kembali Belanja Barang TA yang lalu	0	0
Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	0	3.201.000
Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	(2.049.700)	1.569.330
Jumlah Pendapatan dari kegiatan non operasional lainnya	(2.049.700)	4.770.330
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		
Beban Penyesuaian Nilai Persediaan	-	0
Beban Aset Ekstrakomtabel Peralatan dan Mesin	-	0
Pendapatan Pelepasan Aset non Lancar		0
Beban Pelepasan Aset Non Lancar	(7.649.017)	0
Pendapatan dari kegiatan non operasional lainnya	-	0
Surplus defisit pelepasan aset non lancar	3.500.000	
Pendapatan dari kegiatan non operasional lainnya	(3.500.000)	0
Jumlah Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	-	-
Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional	(2.099.317)	4.770.930

**) Pendapatan/Beban Penyesuaian Nilai Persediaan timbul karena kebijakan penilaian persediaan menggunakan metode Harga Perolehan Terakhir. Akun ini tidak akan muncul ketika penilaian persediaan menggunakan metode First In First Out (FIFO) mulai tahun 2018.*

Pendapatan dari kegiatan non operasional lainnya berasal dari Pendapatan dari penjualan peralatan dan mesin sebesar Rp2.049.700 yaitu penjualan 1 paket peralatan

dan mesin inventaris kantor sebesar **Rp2.049.700,00** dengan sesuai dengan Risalah Lelang nomor 67/17.04/2024-01 tanggal 30 Mei 2024 dengan nomor NTPN : 865263CIFKA1IVSD dan NTB : 240603306184. Pendapatan dari kegiatan non operasional lainnya berasal dari Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara berupa Penyelesaian TGR Motor Hilang An. Taufik Laima sesuai Surat Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor : KEP.104/KEPMEN-KP/PL.790/X/2024 Tentang Pembebanan Penggantian Kerugian Sementara Kepada Saudara Taufik Laima,S.Pi Pegawai Pada Stasiun PSDKP Biak. Kode Billing : 820241112353323, NTB : 241112052649, NTPN : 76DA52G4VQ6QTIHB, Tanggal bayar 12 November 2024, Nilai TGR **Rp3.500.000,00**

*Pos Luar
Biasa Rp0*

D.13 Pos Luar Biasa

Tidak ada saldo pada Pos Luar Biasa per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023.

E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

E.1 Ekuitas Awal

Ekuitas Awal
Rp15.146.176.350,00

Nilai ekuitas pada tanggal 1 Januari 2024 dan 1 Januari 2023 adalah masing-masing sebesar Rp15.146.176.350,00 dan Rp15.483.258.786,00.

E.2 Surplus (Defisit) LO

Defisit LO
(Rp24.597.629.039,00)

Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp(24.597.629.039,00) dan Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp(24.673.909.769,00). Defisit LO merupakan selisih kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, surplus/defisit kegiatan non operasional, dan pos luar biasa.

E.3.1 Penyesuaian Nilai Aset

Penyesuaian Nilai Aset
Rp0

Nilai Penyesuaian Nilai Aset untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp0. Penyesuaian Nilai Aset merupakan hasil penyesuaian nilai persediaan akibat penerapan kebijakan harga perolehan terakhir.

E.3.2 Koreksi Nilai Persediaan

Koreksi Nilai Persediaan
Rp0

Koreksi Nilai Persediaan mencerminkan koreksi atas nilai persediaan yang diakibatkan karena kesalahan dalam penilaian persediaan yang terjadi pada periode sebelumnya. Tidak ada Koreksi nilai per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023.

Selisih

Revaluasi

Aset Tetap

Rp0

E.3.3 Selisih Revaluasi Aset Tetap

Selisih Revaluasi Aset Tetap merupakan selisih yang muncul pada saat dilakukan penilaian ulang aset tetap. Tidak ada nilai Selisih Revaluasi Aset Tetap untuk periode 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp0 dan 31 Desember 2023 sebesar Rp0.

Koreksi Nilai

Aset Non

Revaluasi

Rp0

E.3.4 Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi

Koreksi atas Aset Tetap Non Revaluasi merupakan koreksi atas aset tetap yang diakibatkan adanya kenaikan aset tetap tersebut atau karena rendahnya nilai aset tetap dalam laporan keuangan. Koreksi pencatatan aset tetap untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp0 dan Rp(59.771.014,00).

Rincian Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi

Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi	31-Dec-24	31-Dec-23
Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi	-	(59.771.014)
Koreksi Nilai Aset Lainnya Non Revaluasi	-	-
Jumlah	-	(59.771.014)

E.3.5 Koreksi Lain-lain

Koreksi Lain-lain

Rp74.898,00

Koreksi lain-lain untuk periode yang berakhir pada 30 Desember 2024 dan 30 Desember 2023 sebesar Rp74.898,00 dan Rp0. Koreksi Lain-lain berasal dari hasil Jurnal Balik atas Penyisihan Piutang Tidak Tertagih.

Transaksi

Antar Entitas

Rp23.604.793
.538,00

E.4 Transaksi Antar Entitas

Nilai Transaksi Antar Entitas untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing – masing sebesar Rp24.389.911.947,00 dan Rp17.656.317.854,00. Transaksi antar Entitas adalah transaksi yang melibatkan dua atau lebih entitas yang berbeda baik internal KL, antar KL, antar BUN maupun KL dengan BUN.

Rincian Nilai Transaksi Antar Entitas

Transaksi antar Entitas	31-Dec-22	31-Dec-22
Ditagihkan ke Entitas Lain	23.628.485.278	24.405.940.972
Diterima dari Entitas Lain	(23.691.740)	(14.258.538)
Transfer Masuk		3.915.000
Transfer Keluar		(5.685.487)
Jumlah	23.604.793.538	24.389.911.947

E.4.1 Diterima dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL)

Diterima dari Entitas Lain/Ditagihkan ke Entitas Lain merupakan transaksi antar entitas atas pendapatan dan belanja pada KL yang melibatkan kas negara (BUN). Pada periode hingga 31 Desember 2024, DDEL sebesar Rp23.691.740,00, sedangkan DKEL sebesar Rp(23.628.485.278,00). Diterima dari Entitas Lain/Ditagihkan ke Entitas Lain merupakan transaksi antar entitas atas pendapatan dan belanja pada KL yang melibatkan kas negara (BUN).

E.4.2 Transfer Masuk/Transfer Keluar

Transfer Masuk/Transfer Keluar merupakan perpindahan aset/kewajiban dari satu entitas ke entitas lain pada internal KL, antar KL dan antara KL dengan BA-BUN. Transfer masuk sampai dengan tanggal 30 Desember 2024 sebesar Rp0.

*Kenaikan/
Penurunan
Ekuitas
Rp(992.760,0
0)*

E.5 Kenaikan / Penurunan Ekuitas

Nilai Kenaikan/Penurunan pada tanggal 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp(992.760.603,00) dan 31 Desember 2023 sebesar Rp(337.082.436,00).

*Ekuitas
Akhir
Rp14.153.41
5.747,00*

E.6 Ekuitas Akhir

Nilai Ekuitas pada tanggal 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp14.153.415.747 dan 31 Desember 2023 adalah Rp15.146.176.350,00

f. PENGUNGKAPAN-PENGUNGKAPAN LAINNYA

F.1 KEJADIAN-KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL NERACA

Tidak ada kejadian penting sampai akhir periode pelaporan per 31 Desember 2023 pada Stasiun PSDKP Biak

F.2 PENGUNGKAPAN LAIN-LAIN

Berdasarkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor KEP.30/MEN/KU.611/2020 tanggal 03 Juli 2020 Tentang Perubahan Ketujuh Atas Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 24/MEN-KP/KU.611/2023 Tentang Perubahan Kelima Puluh Satu Atas Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor Kep.79/MEN/KU.611/2019 Tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran Pada Satuan Kerja Kantor Daerah (Unit Pelaksana Teknis) Di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan; Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor KEP.038/Sta.8/KU.110/2023 tanggal 13 Juli 2023 Tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen dan Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar Pada Satuan Kerja Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Biak; dan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor KEP.039/Sta.8/KU.110/2023 tanggal 13 Juli 2023 Tentang Pengangkatan Bendahara Pengeluaran Pada Satuan Kerja Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Biak, telah

dilakukan penggantian Pejabat Pengelola Keuangan. Penggantian pejabat dimaksud adalah sebagai berikut :

KPA	: Mochamad Erwin, S.St.Pi., MH
PPK	: Exfar Alli Ridwan, S.Pi

PPSPM : Julistrio Bobby, S.Kel
Bendahara : Ariyanti Sastriani, S.Pi

Stasiun PSDKP Biak telah dan/atau sedang melaksanakan pengadaan Barang dan Jasa pada Tahun Anggaran 2024 yang dilakukan secara kontraktual, pekerjaan tersebut diantaranya:

- a. Pekerjaan Sewa Gedung Kantor Satwas SDKP Nabire dilaksanakan sesuai dokumen perjanjian sewa gedung kantor nomor 014/PPK/PSDKPSta.8/KU.430/I/2024 tanggal 10 Januari 2024 dengan nilai kontrak Rp55.000.000,00 (termasuk pajak). Tanggal kontrak mulai dari 1 Januari – 31 Desember 2024. Pekerjaan ini sudah diserahterimakan oleh penyedia ke PPK Stasiun PSDKP Biak dengan BAST nomor 017/PPK/PSDKPSta.8/PL.450/I/2024 tanggal 10 Januari 2024.
- b. Pekerjaan Sewa Gedung Kantor Satwas SDKP Manokwari dilaksanakan sesuai dokumen perjanjian sewa gedung kantor nomor 031/PPK/PSDKPSta.8/KU.430/I/2024 tanggal 25 Januari 2024 dengan nilai kontrak Rp55.000.000,00 (termasuk pajak). Tanggal kontrak mulai dari 1 Januari – 31 Desember 2024. Pekerjaan ini sudah diserahterimakan oleh penyedia sesuai dokumen perjanjian sewa gedung kantor nomor

031/PPK/PSDKPSta.8/KU.430/I/2024 tanggal 25 Januari 2024

- c. BBM Kapal Pengawas Hiu Macan 04 dilaksanakan sesuai dengan dokumen kontrak nomor SP-003/PNDB10000/2024-S3 tanggal 9 Januari 2024. Nilai kontrak pada pekerjaan ini Rp4.190.640.000,00 pelaksanaan kontrak tanggal 1 Januari – 31 Desember 2024.
- d. Pengadaan Suku Cadang Kapal Pengawas dilaksanakan sesuai dengan Surat Perjanjian Kontrak/ SPK nomor 075/PPK/PSDKPSta.8/PL.430/III/2024 tanggal 25 Maret 2024. Nilai kontrak pada pekerjaan ini sebesar Rp229.720.959,00 (termasuk pajak) dengan waktu pelaksanaan kontrak 120(Seratus dua puluh) hari kalender. Pengadaan ini sudah diserahterimakan oleh penyedia ke PPK Stasiun PSDKP Biak dengan BAST nomor 118/PPK/PSDKPSta.8/PL.450/V/2024 tanggal 24 Mei 2024.
- e. Pengadaan Perlengkapan Kapal Pengawas Hiu Macan 04 dilaksanakan sesuai dengan surat perjanjian kontrak/ SPK nomor 128/PPK/PSDKPSta.8/PL.430/VI/2024 Tanggal 05 Juni 2024. Nilai kotrak pada pekerjaan ini Rp157.059.450,00 (Termasuk pajak) dengan waktu pelaksanaan kontrak 30 (tiga puluh) hari kalender. Pengadaan ini sudah diserahterimakan oleh penyedia ke PPK Stasiun PSDKP Biak dengan BAST nomor

163/PPK/PSDKPSta.8/PL.450/VII/2024 Tanggal
02 Juli 2024.

- f. Docking Kapal Pengawas dilaksanakan sesuai dengan surat perjanjian kontrak/ SPK nomor 132/PPK/PSDKPSta.8/PL.430/VI/2024 Tanggal 10 Juni 2024. Nilai kotrak pada pekerjaan ini Rp1.446.316.703,00 (Termasuk pajak) dengan waktu pelaksanaan kontrak 65 (Enam puluh lima) hari kalender. Pengadaan ini sudah diserahterimakan oleh penyedia ke PPK Stasiun PSDKP Biak dengan BAST nomor 215.f/PPK/PSDKPSta.8/PL.450/VIII/2024 Tanggal 14 Agustus 2024.
- g. Pengawasan Docking Kapal Pengawas dilaksanakan sesuai dengan surat perjanjian kontrak/ SPK nomor 136/PPK/PSDKPSta.8/PL.430/VI/2024 Tanggal 10 Juni 2024. Nilai kotrak pada pekerjaan ini Rp93.795.000,00 (Termasuk pajak) dengan waktu pelaksanaan kontrak 65 (Enam puluh lima) hari kalender. Pengadaan ini sudah diserahterimakan oleh penyedia ke PPK Stasiun PSDKP Biak dengan BAST nomor 215.d/PPK/PSDKPSta.8/PL.450/VIII/2024 Tanggal 14 Agustus 2024.
- h. Pembangunan Kontruksi Pagar Satwas SDKP Manokwari dilaksanakan sesuai dengan surat perjanjian kontrak/ SPK nomor 154/PPK/PSDKPSta.8/PL.430/VI/2024 Tanggal 28 Juni 2024 Nilai kotrak pada pekerjaan ini Rp471.597.000,00 (Termasuk pajak) dengan waktu

pelaksanaan kontrak 60 (Enam Puluh) hari kalender. Pengadaan ini sudah diserahkan oleh penyedia ke PPK Stasiun PSDKP Biak dengan BAST nomor 238/PPK/PSDKPSta.8/PL.450/IX/2024 Tanggal 05 September 2024.

- i. Pengawasan Kontruksi Pembangunan Pagar Satwas SDKP Manokwari dilaksanakan sesuai dengan surat perjanjian kontrak/ SPK nomor 155/PPK/PSDKPSta.8/VI/2024 Tanggal 28 Juni 2024 Nilai kotrak pada pekerjaan ini Rp41.269.800,00 (Termasuk pajak) dengan waktu pelaksanaan kontrak 60 (Enam Puluh) hari kalender. Pengadaan ini sudah diserahkan oleh penyedia ke PPK Stasiun PSDKP Biak dengan BAST nomor 238.a/PPK/PSDKPSta.8/PL.450/IX/2024 Tanggal 05 September 2024.
- j. Perencanaan Teknis Pembangunan Pos Security Dan Rumah Genset Stasiun PSDKP Biak dilaksanakan sesuai dengan surat perjanjian kontrak/ SPK nomor 256/PPK/PSDKPSta.8/PL.430/IX/2024 Tanggal 20 September 2024. Nilai kotrak pada pekerjaan ini Rp54.390.00,00 (Termasuk Pajak) dengan waktu pelaksanaan kontrak 90 (Sembilan Puluh) Hari kalender. Pekerjaan ini sudah di serah terimakan oleh penyedia ke PPK Stasiun PSDKP Biak dengan nomor BAST 374/PPK/PSDKPSta.8/PL.450/XII/2024 Tanggal 16 Desember 2024.

- k. Pengadaan Peralatan Fasilitas Perkantoran dilaksanakan sesuai dengan surat perjanjian kontrak/ SPK nomor 254/PPK/PSDKPSta.8/PL.430/IX/2024 Tanggal 20 September 2024. Nilai kotrak pada pekerjaan ini Rp91.630.500,00 (Termasuk Pajak) dengan waktu pelaksanaan kontrak 30 (Tiga Puluh) hari kalender. Pekerjaan ini sudah di serah terimakan oleh penyedia ke PPK Stasiun PSDKP Biak dengan nomor BAST 283/PPK/PSDKPSta.8/PL.450/X/2024 Tanggal 18 Oktober 2024.
- l. Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Stasiun PSDKP Biak di laksanakan sesuai dengan surat perjanjian kontrak/SPK nomor 287/PPK/PSDKPSta.8/PL.430/X/2024 tanggal 18 Oktober 2024. Nilai kotrak pada pekerjaan ini Rp183.000.000,00 (Termasuk Pajak) dengan waktu pelaksanaan kontrak 60 (Enam Puluh) hari kalender. Pekerjaan ini sudah di serah terimakan oleh penyedia ke PPK Stasiun PSDKP Biak dengan nomor BAST 368/PPK/PSDKPSta.8/PL.450/XII/2024 Tanggal 16 Desember 2024.
- m. Pembangunan Pos security dan Rumah Genset Stasiun PSDKP Biak di laksanakan sesuai dengan surat perjanjian kontrak/SPK nomor 315/PPK/PSDKPSta.8/PL.430/XI/2024 tanggal 11 November 2024. Nilai kotrak pada pekerjaan ini Rp336.335.000,00 (Termasuk Pajak) dengan waktu pelaksanaan kontrak 45 (Empat Puluh Lima) hari

kalender. Pekerjaan ini sudah di serah terimakan oleh penyedia ke PPK Stasiun PSDKP Biak dengan nomor BAST 371/PPK/PSDKPSta.8/PL.450/XII/2024 Tanggal 16 Desember 2024.

- n. Pengawasan Kontruksi Pembangunan Pos security dan Rumah Genset Stasiun PSDKP Biak di laksanakan sesuai dengan surat perjanjian kontrak/SPK nomor 317/PPK/PSDKPSta.8/PL.430/XI/2024 tanggal 11 November 2024. . Nilai kotrak pada pekerjaan ini Rp34.376.700.000,00 (Termasuk Pajak) dengan waktu pelaksanaan kontrak 45 (Empat Puluh Lima) hari kalender. Pekerjaan ini sudah di serah terimakan oleh penyedia ke PPK Stasiun PSDKP Biak dengan nomor BAST 376/PPK/PSDKPSta.8/PL.450/XII/2024 Tanggal 16 Desember 2024.
- o. Perawatan Darurat Speedboat Dolphin 016 (Pengadaan Mesin) di laksanakan sesuai dengan surat perjanjian kontrak/SPK nomor 340/PPK/PSDKPSta.8/PL.430/XII/2024 tanggal 03 Desember 2024. . Nilai kotrak pada pekerjaan ini Rp439.000.000,00 (Termasuk Pajak) dengan waktu pelaksanaan kontrak 17 (Tujuh Belas) hari kalender. Pekerjaan ini sudah di serah terimakan oleh penyedia ke PPK Stasiun PSDKP Biak dengan nomor BAST 382/PPK/PSDKPSta.8/PL.450/XII/2024 Tanggal 17 Desember 2024.

p. Terdapat 5 rekening yang dikelola di Stasiun PSDKP Biak yang terdiri dari

1. Rekening Virtual Account Bendahara Pengeluaran Stasiun PSDKP Biak
2. Rekening Virtual Account BPP Satwas SDKP Jayapura
3. Rekening Virtual Account BPP Satwas SDKP Manokwari
4. Rekening Pemerintah Lainnya (RPL) Satwas SDKP Nabire
5. Rekening Pemerintah Lainnya (RPL) KP. Hiu Macan 04

q. Terdapat jaminan pemeliharaan sebesar Rp23.579.850,00 untuk paket pekerjaan pembangunan konstruksi pagar manokwari Satwas SDKP Manokwari dengan Nomor Jaminan : 18.93.01.070019.09.24. Surat jaminan berlaku 90 (sembilan puluh) hari kalender dan efektif mulai dari tanggal 06 September 2024 sampai dengan tanggal 04 Desember 2024.

r. Terdapat jaminan pemeliharaan sebesar Rp16.816.750,00 untuk paket pekerjaan Pembangunan Pos Security dan rumah genset Stasiun PSDKP Biak dengan Nomor Jaminan : 18.93.01.070252.12.24. Surat Jaminan berlaku selama 90 (Sembilan Puluh) hari kalender dan efektif mulai dari tanggal 16 Desember 2024 sampai dengan tanggal 16 Maret 2025.